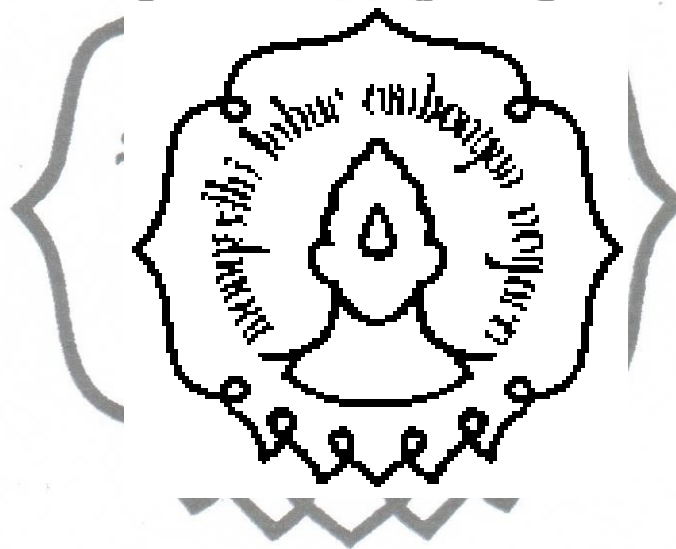


**PERANAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT (PNPM) DALAM PENGEMBANGAN  
EKONOMI PEDESAAN DI KABUPATEN SRAGEN**

**Tesis**

**Program Magister Ekonomi dan Studi Pembangunan**

**Konsentrasi  
Ekonomi Sumberdaya Manusia dan Pembangunan**



**Diajukan oleh:**

**R. TRIYONO PUTRO**

**S 4208028**

**PROGRAM MAGISTER EKONOMI DAN STUDY PEMBANGUNAN  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
SURAKARTA  
2010**

**Halaman Persetujuan Pembimbing Tesis**

**PERANAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT (PNPM) DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI  
PEDESAAN DI KABUPATEN SRAGEN**

**Diajukan oleh:**

**R. TRIYONO PUTRO**

**S 4208028**

Telah disetujui oleh Tim Pembimbing

Pada tanggal : \_\_\_\_\_

Pembimbing I

Pembimbing II

Pror. Dr. Hartono, MS  
NIP. 19531221 198003 1 004

Drs. Akhmad Daerobi, MS  
NIP. 19570804 198601 1 002

Ketua Program Studi  
Magister Ekonomi dan Studi Pembangunan

Dr. J.J. Sarungu, MS  
NIP. 19510701 198010 1 001

*commit to user*

## Halaman Persetujuan Penguji Tesis

# PERANAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI PEDESAAN DI KABUPATEN SRAGEN

Diajukan oleh:



**R. TRIYONO PUTRO**

**S 4208028**

Telah disetujui dan disahkan oleh Tim Penguji :  
Pada Tanggal : .....

Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Ketua Tim Penguji	: Dr. Evi Gravitiani, M.Si	.....
Pembimbing I	: Prof. Dr. Hartono, MS	.....
Pembimbing II	: Drs. Akhmad Daerobi, MS	.....

Direktur PPS UNS

Mengetahui,

Ketua Program Magister Ekonomi dan Studi  
Pembangunan

Prof. Drs. Suranto, MS.c, Ph.D  
NIP. 19570820 1985031004

Dr. J.J. Sarungu, MS  
NIP. 19510701 198010 1 001

*commit to user*

**PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini saya :

Nama : R. TRIYONO PUTRO

NIM : S 208028

Sebagai Mahasiswa Pasca Sarjana Program Magister Ekonomi dan Studi Pembangunan Universitas Sebelas Maret Surakarta. Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini bukan merupakan jiplakan dari karya orang lain.

Dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Surakarta, Oktober 2010

R. Triyono Putro

S 4208028

*commit to user*

## *PERSEMBAHAN*

*Setulus hati kepersembahkan untuk:*

*Istri dan Anak-anakku yang selalu memotivasiku*

*Ayah ibuku yang tak henti memberikan kasih sayang dan doa...*

*Teman-teman di lingkungan Setda Kabupaten Sragen*



*commit to user*

## MOTTO

- Kebahagiaan adalah salah satunya yang akan bertambah jika orang mau membaginya.
- Mengerjakan sesuatu yang setengah-setengah tidak akan saya lakukan, mengerjakannya sampai tuntas atau tidak dilakukan sama sekali.
- Bahagia adalah cinta, bukan yang lain. Siapa yang dapat mencintai, itulah kebahagiaan.
- Melupakan kesalahanmu kapan saja tetapi jangan pernah melupakan apa yang dari hal itu engkau telah mendapat pelajaran.



## INTISARI

### PERANAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI PEDESAAN DI KABUPATEN SRAGEN

Tujuan penelitian ini adalah untuk : 1) mengetahui respon dan persepsi perangkat desa terhadap pelaksanaan PNPM, 2) mengetahui karakteristik anggota kelompok UPPKS pemanfaatan dana PNPM pada program PPK di Kabupaten Sragen, 3) mengetahui partisipasi masyarakat terhadap program PNPM 4) mengetahui pemanfaatan PNPM oleh anggota kelompok UPPKS di Kabupaten Sragen, dan 5) mengetahui pengaruh persepsi penerima program PNPM-PKK, intervensi perangkat desa dan kinerja tenaga pendamping masyarakat terhadap pengembangan ekonomi pedesaan pada PNPM-PKK pengentasan kemiskinan di Kabupaten Sragen.

Populasi dalam penelitian ini adalah keluarga penerima dana PNPM di wilayah Sragen. Pengambilan sampel berdasarkan teknik *cluster randome sampling* yakni teknik penentuan sampel dengan mengambil sampel berdasarkan cluster atau dikelompokkan, dari 20 kecamatan di kabupaten Sragen, diambil 1 (satu) kecamatan, diperoleh kecamatan Kalijambe. Dari 14 (empat belas) desa di kecamatan kalijambe, diperoleh 15 responden dari pamong praja, dan 38 responden dari anggota kelompok UPPKS.

Analisa data menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif. Metode kualitatif digunakan untuk mengetahui 1) mengetahui respon dan persepsi perangkat desa terhadap pelaksanaan PNPM, 2) mengetahui karakteristik anggota kelompok UPPKS pemanfaatan dana PNPM pada program PPK di Kabupaten Sragen, 3) mengetahui partisipasi masyarakat terhadap program PNPM 4) mengetahui pemanfaatan PNPM oleh anggota kelompok UPPKS di Kabupaten Sragen. Metode Kuantitatif digunakan untuk menguji hipotesis tentang pengaruh persepsi penerima program PNPM-PKK, intervensi perangkat desa dan kinerja tenaga pendamping masyarakat terhadap pengembangan ekonomi pedesaan pada PNPM-PKK pengentasan kemiskinan di Kabupaten Sragen.

Hasil uji hipotesis menunjukkan 1) persepsi penerima program PNPM-PKK berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengembangan ekonomi pedesaan, 2) intervensi perangkat desa berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Pengembangan ekonomi pedesaan, 3) kinerja tenaga pendamping masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengembangan ekonomi pedesaan, 4) persepsi penerima program PNPM-PKK, Intervensi perangkat desa dan Kinerja tenaga pendamping masyarakat berpengaruh secara simultan terhadap Pengembangan ekonomi pedesaan di Kabupaten Sragen, 5) persepsi penerima program PNPM-PKK merupakan variabel yang dominan dalam mempengaruhi pengembangan ekonomi pedesaan dan 6) persepsi penerima program PNPM-PKK, intervensi perangkat desa dan kinerja tenaga pendamping masyarakat dapat menjelaskan pengembangan ekonomi pedesaan di Kabupaten Sragen sebesar 26,1%, sedangkan sisanya sebesar 83,9% dijelaskan oleh variabel lain.

#### **Kata Kunci :**

*PNPM, UPPKS, Kabupaten Sragen, Kecamatan Kalijambe, persepsi penerima program, intervensi perangkat desa, kinerja tenaga pendamping dan pengembangan ekonomi pedesaan*  
*commit to user*

## ABSTRACT

### **ROLE PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) IN RURAL ECONOMIC DEVELOPMENT IN THE DISTRICT SRAGEN**

The aim of this study were to: 1) study the response and the perception of the village towards the implementation of the PNPM, 2) know the characteristics of group members UPPKS utilization of funds in KDP PNPM in Sragen, 3) knowing participation in the program PNPM 4) knowing use by members of the PNPM UPPKS groups in Sragen, and 5) the effect of perception-PKK PNPM program beneficiaries, the intervention of the village and the performance of public assistance to rural economic development in poverty alleviation PNPM-PKK of Sragen Regency.

The population in this study is the beneficiary families in the region Saragen PNPM. Taking sauce based on the sampling technique randome cluster sampling technique by taking a sample based on clusters or grouped, from 20 subdistricts in Sragen regency, taken 1 (one) sub-district, district obtained Kalijambe. Of the 14 (fourteen) villages in Kalijambe, obtained 15 respondents from the civil service, and 38 respondents from group members UPPKS.

Analysis of data using qualitative and quantitative methods. Metod qualitatively used to determine 1) to study the response and the perception of the village towards the implementation of the PNPM, 2) know the characteristics of group members UPPKS utilization of funds in KDP PNPM in Sragen, 3) knowing participation in the program PNPM 4) knowing use of PNPM by group members UPPKS in Sragen. Quantitative methods are used to test hypotheses about the influence of the influence of perception-PKK PNPM program beneficiaries, the intervention of the village and the performance of public assistance to rural economic development in poverty alleviation PNPM-PKK of Sragen Regency.

Hipotesi test results showed 1) the perception of beneficiaries of the program PNPM-PKK has positive and significant impact on rural economic development, 2) the intervention of the village has a negative and significant impact on rural economic development, 3) the performance of pedamping society has positive and significant impact on rural economic development, 4) the perception of beneficiaries of the program PNPM-PKK, Intervention and Performance of the village community pedamping effect simultaneously on rural economic development in Sragen, 5) receiver ersepsi PNPM-PKK is a dominant variable in affecting the economic development of rural and 6) perception of the recipient PNPM-PKK, the intervention of the village and the performance of public assistance to explain rural economic development in Sragen by 26.1%, while the remaining amount of 83.9% explained by other variables.

#### **Keywords:**

*PNPM, UPPKS, Sragen regency, Kalijambe, the perception of beneficiaries, the intervention of the village, the performance of escort and rural economic development.*



## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul Peranan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Dalam Pengembangan Ekonomi Pedesaan di Kabupaten Sragen.

Terselesaikannya penyusunan Tesis ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Dalam kesempatan ini perkenankanlah penulis dengan segala kerendahan hati mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Dr. JJ. Sarungu, MS, selaku Ketua Program Magister Ekonomi Dan Studi Pembangunan Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan ijin penelitian.
2. Prof. Dr. Hartono, MS selaku pembimbing I yang telah memberikan masukan yang sangat berharga.
3. Drs. Akhmad Daerobi, MS selaku pembimbing II yang telah dengan sabar memberikan bimbingan dan arahan bagi kelancaran penulisan tesis ini.
4. Bapak Ibu Dosen Program Magister Ekonomi Dan Studi Pembangunan Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis yang dapat dijadikan dasar dalam penulisan Tesis ini.
5. Segenap karyawan dan karyawan MESP UNS, Perpustakaan Ekonomi UNS, Perpustakaan Pusat UNS, Perpustakaan Pasca Sarjana UNS atas pelayanan dan kemudahan yang diberikan kepada penulis.
6. Semua pihak yang telah membantu menyelesaikan Tesis ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

*commit to user*

Akhir kata, peneliti menyadari dalam penyusunan Tesis ini banyak kekurangannya, maka segala kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan. Semoga Tesis ini bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Surakarta, Oktober 2010



## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
PERSEMBAHAN .....	v
MOTTO .....	vi
INTISARI.....	vii
ABSTRACT .....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI .....	xi
DAFTAR TABEL .....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN .....	xii
BAB I    PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian .....	11
D. Manfaat Penelitian .....	12
BAB II    TINJAUAN PUSTAKA .....	13
A. Tinjauan Teori.....	13

1. Konsep Pemberdayaan .....	13
2. Teori Perkembangan Ekonomi Neo Klasik.....	22
3. Pandangan Teoritis Mengenai Kemiskinan.....	25
4. Program Nasional PNPM .....	29
B. Penelitian Terdahulu .....	33
C. Kerangka Pemikiran.....	38
D. Hipotesis .....	42
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>43</b>
A. Jenis Penelitian .....	43
B. Populasi Dan Sampel .....	43
C. Variabel Penelitian.....	44
D. Definisi Operasional.....	44
E. Analisis Data .....	46
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>50</b>
A. Pelaksanaan Penelitian.....	50
B. Data Hasil Penelitian.....	53
1. Respon data Persepsi Perangkat Desa Terhadap PNPM.....	53
2. Karakteristik anggota Kelompok UPPKS .....	56
3. Partisipasi masyarakat terhadap PNPM .....	58
4. Pemanfaatan dana PNPM oleh anggota UPPKS.....	60
5. Persepsi penerima Program PNPM-PKK .....	62
6. Intervensi Perangkat Desa .....	63
7. Kinerja Tenaga Pendamping Masyarakat.....	64

8. Pengembangan Ekonomi Pedesaan.....	65
C. Uji Instrumen .....	66
1. Uji Validitas.....	66
2. Reliabilitas .....	68
D. Uji Asumsi Klasik.....	69
1. Uji Normalitas .....	70
2. Uji Autokorelasi .....	71
3. Uji Heteroskedastisitas.....	71
4. Uji Multikolinieritas .....	72
E. Uji Hipotesis .....	73
F. Pembahasan .....	75
1. Hasil Temuan Pertama.....	75
2. Hasil Temuan Kedua.....	76
3. Hasil Temuan Ketiga.....	77
4. Hasil Temuan Keempat.....	77
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....	78
B. Kesimpulan .....	78
C. Saran .....	81
DAFTAR PUSTAKA .....	

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kegiatan perekonomian di pedesaan masih didominasi oleh usaha-usaha skala mikro dan kecil dengan pelaku utama para petani, buruh tani, pedagang sarana produksi dan hasil pertanian, pengolah hasil pertanian, serta industri rumah tangga. Namun demikian, para pelaku usaha ini pada umumnya masih dihadapkan pada permasalahan klasik yaitu terbatasnya ketersediaan modal. Sebagai unsur esensial dalam mendukung peningkatan produksi dan taraf hidup masyarakat pedesaan, keterbatasan modal dapat membatasi ruang gerak aktivitas sektor pertanian dan pedesaan (Hamid, 1986).

Dalam jangka panjang, kelangkaan modal bisa menjadi *entry point* terjadinya siklus rantai kemiskinan pada masyarakat petani/pedesaan yang sulit untuk diputus. Walaupun insiden kemiskinan secara faktual tidak dibatasi oleh aspek *spatial* dan sektoral, namun tidak dapat dipungkiri bahwa mayoritas orang miskin berada di daerah pedesaan dan umumnya bekerja di sektor pertanian.

Menurut BPS, jumlah penduduk miskin pada tahun 2004 mencapai 36,1 juta orang, dan sebanyak 21,3 juta (58,8%) di antaranya bekerja di sektor pertanian. Lemahnya permodalan pelaku ekonomi di pedesaan telah disadari oleh pemerintah dan akhirnya terdorong untuk meluncurkan beberapa kredit

program yang ditujukan kepada petani dan pengusaha kecil dan mikro sejak Repelita I.

Pada bulan September 2006, menanggapi meningkatnya angka kemiskinan di negara ini, Presiden Indonesia mengumumkan keputusan pemerintah untuk melaksanakan sebuah kebijakan baru mengenai penanggulangan kemiskinan dan penciptaan kesempatan kerja. Sasarannya adalah mengurangi angka kemiskinan menjadi 8 persen di tahun 2009 dari 18 persen di bulan Maret 2006, dan menurunkan tingkat pengangguran dari 10 persen di tahun 2006 menjadi 5 persen di tahun 2009.

Sasaran ini hendak dicapai melalui pepaduan antara kegiatan pembangunan berbasis masyarakat (CDD – *Community Driven Development*) dan kegiatan padat karya selama tahun 2007, kemudian berlanjut ke hanya dua model pemberdayaan masyarakat (perkotaan dan pedesaan) di tahun 2008, dengan bantuan tunai bersyarat (*conditional cash transfer*) terintegrasi ke dalamnya. Secara keseluruhan, kegiatan-kegiatan tersebut akan membentuk Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM).

Beberapa program telah dapat mencapai tujuannya dalam meningkatkan produksi (misalnya pada komoditas padi), tetapi ada indikasi bahwa kinerjanya tidak memuaskan terutama pada lembaga keuangan sebagai pelaksana. Menurut Martowijoyo (2002), lemahnya kinerja lembaga keuangan dapat dilihat dari tiga aspek, yaitu: (1) rendahnya tingkat pelunasan kredit; (2) rendahnya moralitas aparat pelaksana, dan (3) rendahnya tingkat mobilisasi dana masyarakat. Kelemahan tersebut membawa konsekuensi pada tidak

berlanjutnya ( *unsustainable* ) lembaga keuangan yang terbentuk setelah program selesai. Akibatnya, peserta program umumnya akan kembali mengalami kekurangan modal usaha.

Untuk meningkatkan efektifitas penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja, pemerintah meluncurkan program penanggulangan kemiskinan yang salah satunya merupakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. Dalam PNPM Mandiri dirumuskan kembali upaya penanggulangan kemiskinan yang melibatkan unsur masyarakat, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi hingga pelestarian. Ruang lingkup kegiatan PNPM Mandiri terbuka bagi semua kegiatan penanggulangan kemiskinan yang diusulkan dan disepakati masyarakat, meliputi : penyediaan dan perbaikan prasarana / sarana lingkungan pemukiman, sosial, peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan kapasitas masyarakat dan pemerintah lokal serta kegiatan ekonomi, meliputi : penyediaan dana bergulir dan kredit mikro untuk mengembangkan kegiatan ekonomi masyarakat miskin yang di kelola di tingkat Kecamatan oleh lembaga Unit Pengelola Kegiatan (UPK).

PNPM menawarkan satu kesempatan unik untuk menangani sebagian dari kendala dalam pemberdayaan perempuan, yang pada akhirnya akan meningkatkan efektifitas penanggulangan kemiskinan. Persiapan PNPM akan banyak memanfaatkan pengalaman dari Program Pengembangan Kecamatan (PPK) dan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP). Kajian



dalam penelitian ini menitik beratkan implementasi program PNPM terhadap masyarakat pedesaan melalui program PPK.

PPK adalah program pemerintah yang bertujuan mengentaskan kemiskinan, memperkuat kelembagaan pemerintah lokal dan masyarakat, serta memperbaiki tata pemerintahan lokal. Untuk mencapai tujuan tersebut, program ini memberikan bantuan langsung (*block grant*) kepada kecamatan-kecamatan untuk pembangunan infrastruktur produktif dan investasi sosial ekonomi yang diidentifikasi melalui sebuah proses perencanaan partisipatif. PPK adalah program pemerintah yang didanai sebagian oleh Bank Dunia, dan sudah berjalan sejak tahun 1998. Program ini mencakup 34.233 desa di lebih dari 2.000 kecamatan termiskin di 252 kabupaten di 30 propinsi.

Dalam PNPM Mandiri dirumuskan kembali upaya penanggulangan kemiskinan yang melibatkan unsur masyarakat, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi hingga pelestarian. Ruang lingkup kegiatan PNPM Mandiri terbuka bagi semua kegiatan penanggulangan kemiskinan yang diusulkan dan disepakati masyarakat, meliputi : penyediaan dan perbaikan prasarana / sarana lingkungan pemukiman, sosial, peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan kapasitas masyarakat dan pemerintah lokal serta kegiatan ekonomi, meliputi : penyediaan dana bergulir dan kredit mikro untuk mengembangkan kegiatan ekonomi masyarakat miskin yang di kelola di tingkat Kecamatan oleh lembaga Unit Pengelola Kegiatan (UPK).

Pemberian fasilitas kredit dengan cara dan prosedur yang mudah serta bunga rendah lewat Kredit Usaha Keluarga Sejahtera (Kukesra). Kredit ini diberikan kepada keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera I alasan ekonomi yang telah memiliki Tabungan Keluarga Sejahtera (Takesra) dan tergabung dalam kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) agar mereka dapat mengembangkan kegiatan ekonomi produktif keluarga. Yang menarik dari program Kukesra ini adalah penerima atau pemakai kredit ini adalah para perempuan.

Tujuan umum program adalah untuk membantu keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera I (alasan ekonomi) untuk meningkatkan tahapan keluarga sejahtera melalui kegiatan ekonomi produktif dalam rangka peningkatan penanggulangan kemiskinan, sedangkan tujuan khususnya adalah sebagai berikut:

1. Membantu keluarga dalam mendapatkan modal usaha dengan syarat ringan, mudah, dan cepat.
2. Merangsang kesadaran, motivasi, dan semangat keluarga untuk berwirausaha.
3. Membantu keluarga mengembangkan kegiatan kemitrausahaan dalam bidang ekonomi.

Dengan adanya kucuran dana diharapkan dapat menambah modal usaha sehingga dapat meningkatkan pendapatan usaha para anggota kelompok UPPKS.

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK) adalah kebijakan dan program pemberdayaan masyarakat perdesaan yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu berkelanjutan. PNPM-PPK merupakan kelanjutan PPK, yang selama ini dinilai berhasil. Keberhasilan PPK diantaranya pertama, program ini berhasil menyediakan lapangan kerja bagi rakyat miskin ( mengatasi masalah pengangguran ) dan sekaligus menambah penghasilan bagi kelompok rakyat miskin (penanggulangan kemiskinan ). Kedua, hasil evaluasi yang dilakukan secara independent menunjukkan program ini telah teruji baik dilihat dari pencapaian tujuannya maupun efisiensinya. Penghematan dari program rata-rata mencapai 56%, artinya sarana prasarana dasar yang dibangun dengan program ini berhasil menekan biaya sebesar 56% dibandingkan dengan program serupa yang dibangun oleh pemerintah sebelumnya. Ketiga, dari hasil penelitian independent, program ini berhasil mewujudkan model perencanaan dari bawah atau lebih dikenal dengan perencanaan partisipatif, sehingga mendekatkan antara kebutuhan riil masyarakat dengan program pembangunan nasional.

PNPM-PPK berupaya terus mempertajam visi dan meningkatkan pencapaian misi PPK. Visi PNPM-PPK adalah kesejahteraan dan kemandirian masyarakat miskin perdesaan. Kesejahteraan berarti terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat. Kemandirian yaitu mampu mengorganisir diri untuk memobilisasi sumber daya yang ada dilingkungannya, mampu mengakses

sumber daya diluar lingkungannya, serta mengelola sumber daya tersebut untuk mengatasi masalah yang dihadapinya, khususnya masalah kemiskinan. Misi PNPM-PPK adalah: (1) Peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaannya, (2) Kelembagaan system pembangunan partisipatif, (3) Pengoptimalan fungsi dan peran pemerintahan lokal, (4 ) Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana dasar masyarakat, (5) Pengembangan jaringan kemitraan dalam pembangunan. Dalam rangka melaksanakan visi dan misi PNPM-PPK, strategi yang dikembangkan PNPM-PPK yaitu menjadikan rumah tangga miskin (RTM ) sebagai kelompok sasaran dan penguatan system pembangunan partisipatif.

Di Kabupaten Sragen melalui PNPM-PPK telah berhasil membangun sarana dan prasaran dasar masyarakat yaitu pengerasan jalan utama desa yang sudah hampir 85 % terbangun, pembangunan dan rehap sarana pendidikan Tamam Kanak-Kanak (TK), pemberian Makanan Tambahan (PMT) balita dan pengadaan alat permainan edukatif (APE) untuk balita di posyandu dan pinjaman dana bergulir yang semua desa telah berpartisipasi.

Untuk keberlanjutan program perlu adanya pemikiran untuk pelestarian asset-asset yang telah dibangun dari program tersebut, sehingga perlu kerjasama yang baik antara masyarakat, pelaku PNPM-PPK dan Pemerintah setempat. Lembaga yang mengelola dana Program adalah UPK PNPM-PPK Kecamatan di Kabupaten Sragen. Sehubungan pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut setiap bulan tiap kecamatan melakukan Musyawarah Antar Desa (MAD) Pertanggungjawaban Kerja/Pengelolaan

Dana dan Rencana Kerja / Pengelolaan Dana. MAD diikuti oleh para Kepala Desa, Ketua TP PKK Desa, 4 wakil masyarakat yang dipilih dalam Musdes perencanaan ( 3 diantaranya perempuan ), dan juga Camat, Konsultan Pendamping PNPM-PPK Kab. Sragen, Konsultan Manajemen PNPM-PPK Kab. Sragen dan para Kepala UPTD/B Tk. Kecamatan.

Pelaksanaan kegiatan dan perkembangan PNPM-PPK di beberapa Kecamatan menunjukkan perkembangan yang pesat dan signifikan. Hal ini ditunjukkan diantaranya bahwa jumlah dana Bantuan Langsung Masyarakat ( BLM ) PNPM-PPK Kecamatan tiap tahun mengalami peningkatan.

Hasil evaluasi tahun 2009 menunjukkan bahwa terdapat beberapa desa di beberapa kecamatan di Kabupaten Sragen menunjukkan hasil yang kurang sesuai dengan yang diharapkan. Terutama yang berkaitan dengan dampak yang diharapkan ternyata belum mampu memberikan nilai tambah terhadap pemberdayaan ekonomi keluarga (Bappeda Kab. Sragen, 2009). Kendala yang dihadapi dalam program PNPM-PPK diantaranya aspek intervensi dari perangkat desa(dalam hal ini adalah kepala desa), kepala desa cenderung mencampuri terlalu dalam dan mendikte panitia pelaksana program di desa(UPK). Bentuk intervensi yang sering timbul adalah pada proses penentuan penerima program dan penentuan jenis kegiatan. Kepala desa biasanya berusaha agar orang-orang yang menerima program adalah orang pilihan kepala desa atau hanya terbatas pada orang-orang yang disukai. Bahkan dalam kondisi tertentu kepala desa berani memaksakan kehendak

untuk memberikan program kepada mereka yang tidak termasuk sasaran program.

Kedua, bentuk intervensi yang lain yakni pada saat penentuan jenis usaha yang diusulkan untuk dibantu oleh program PNPM-PPK. Pada pelaksanaan program PNPM-PPK terdapat kecenderungan jenis kegiatan usaha ekonomi yang dibiayai program biasanya sama atau sejenis. Keseragaman tersebut seringkali bukan muncul secara alami dan atas kehendak masyarakat, tetapi lebih merupakan hasil pengkondisian atau hasil sebuah rekayasa. Motif yang mendasari bisa karena faktor kepentingan atau karena mencari cara termudah. Berkaitan dengan keberadaan tenaga pendamping masyarakat (TPM) secara konseptual mempunyai andil yang besar bagi keberhasilan program PNPM-PPK.

Keberadaan dari tenaga penadamping masyarakat yang tidak maksimal dalam menjalankan peran dan fungsinya dapat menimbulkan permasalahan sendiri. Proses yang seharusnya dilalui dalam kegiatan program yakni mulai dari sosialisasi sampai pada kegiatan evaluasi memerlukan pendampingan dan fasilitasi yang cukup. Intensitas kehadiran dan kohesifitas TPM menjadi penting dalam program pemberdayaan masyarakat. Analisis permasalahan yang tepat dan bentuk penyelesaian yang sesuai akan menentukan tingkat keberhasilan program tersebut. Begitu pula proses peningkatan partisipasi masyarakat utamanya masyarakat miskin sangat ditentukan bagaimana TPM mendorong agar masyarakat miskin tergugah untuk terlibat untuk menentukan proses pengambilan keputusan dalam program tersebut. Keberadaan TPM

yang optimal akan mampu mengontrol proses yang mengarah pada pengeliminasian kelompok miskin oleh kelompok yang berkuasa.

Hal lain yang menjadi permasalahan dalam program ini yakni persepsi atau anggapan yang keliru dari penerima program terhadap keberadaan program tersebut. Penerima program seringkali memahami program PNPM-PPK adalah merupakan bantuan cuma-cuma kepada masyarakat miskin. Pemahaman yang keliru tersebut sudah tumbuh dan berkembang dimasyarakat sedemikian luas sehingga setiap kali terdapat program atau dana yang masuk ke desa, biasanya dianggap sebagai bantuan cuma-cuma dan tidak perlu untuk mengembalikan.

Persepsi atau pemahaman yang keliru tersebut dapat terjadi disebabkan oleh karena beberapa hal yang pertama, karena aspek sosialisasi yang tidak optimal sehingga menyebabkan sebuah pemahaman yang tidak utuh. Kedua, kondisi tersebut juga dipengaruhi oleh kondisi eksternal yang berkembang bahwatelah banyak program yang serupa dengan PNPM-PPK yang ketika penerima program tidak mau mengembalikan pinjaman, mereka tidak mendapatkan sanksi apapun.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, perumusan masalah dalam penelitian ini antara lain:

1. Apakah persepsi penerima program PNPM-PKK berpengaruh terhadap pengembangan ekonomi pedesaan pada PNPM-PKK pengentasan kemiskinan di Kabupaten Sragen ?

2. Apakah intervensi perangkat desa dan kinerja tenaga pendamping masyarakat berpengaruh terhadap pengembangan ekonomi pedesaan pada PNPM-PKK pengentasan kemiskinan di Kabupaten Sragen ?
3. Apakah kinerja tenaga pendamping masyarakat berpengaruh terhadap pengembangan ekonomi pedesaan pada PNPM-PKK pengentasan kemiskinan di Kabupaten Sragen ?
4. Apakah persepsi penerima program PNPM-PKK, intervensi perangkat desa dan kinerja tenaga pendamping masyarakat berpengaruh secara simultan terhadap pengembangan ekonomi pedesaan pada PNPM-PKK pengentasan kemiskinan di Kabupaten Sragen ?

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah diatas, tujuan penelitian antara lain:

1. Mengetahui pengaruh persepsi penerima program PNPM-PKK terhadap pengembangan ekonomi pedesaan pada PNPM-PKK pengentasan kemiskinan di Kabupaten Sragen
2. Mengetahui pengaruh intervensi perangkat desa terhadap pengembangan ekonomi pedesaan pada PNPM-PKK pengentasan kemiskinan di Kabupaten Sragen
3. Mengetahui pengaruh kinerja tenaga pendamping masyarakat terhadap pengembangan ekonomi pedesaan pada PNPM-PKK pengentasan kemiskinan di Kabupaten Sragen



4. Mengetahui pengaruh persepsi penerima program PNPM-PKK, intervensi perangkat desa dan kinerja tenaga pendamping masyarakat secara simultan terhadap pengembangan ekonomi pedesaan pada PNPM-PKK pengentasan kemiskinan di Kabupaten Sragen

#### **D. Manfaat Penelitian**

Diharapkan penelitian ini akan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Pemda

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi pemerintah daerah Kabupaten Sragen mengenai partisipasi masyarakat pedesaan dalam rangka pengentasan Kemiskinan melalui program PNPM yang dikelola oleh PPK di kabupaten Sragen.

2. Bagi Pihak Lain

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi peneliti lain untuk mengadakan penelitian lebih lanjut tentang partisipasi masyarakat dalam rangka pengentasan Kemiskinan melalui PNPM.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Teori

##### 1. Konsep Pemberdayaan

Pemberdayaan masyarakat menyangkut dua kelompok yang saling terkait, yaitu masyarakat yang belum berkembang sebagai pihak yang harus diberdayakan, dan pihak yang menaruh kepedulian sebagai pihak yang memberdayakan (Sumodiningrat, 1997). Adimihardja dan Hikmat (2001) mengemukakan bahwa pemberdayaan merupakan pelimpahan proses pengambilan keputusan dan tanggung jawab secara penuh. Pemberdayaan bukan berarti melepaskan pengendalian, tapi menyerahkan pengendalian. Dengan demikian pemberdayaan bukanlah masalah hilangnya pengendalian atau hilangnya hal-hal lain. Yang paling penting, pemberdayaan memungkinkan pemanfaatan kecakapan dan pengetahuan masyarakat seoptimal mungkin untuk kepentingan masyarakat itu sendiri.

Menurut Priyono dan Pranarka (1996) proses pemberdayaan mengandung dua kecenderungan. *Pertama*, proses pemberdayaan dengan kecenderungan primer menekan pada proses memberikan kekuasaan, kekuatan atau kemampuan kepada masyarakat agar individu yang bersangkutan menjadi lebih berdaya. Proses ini dapat dilengkapi dengan upaya membangun aset material guna mendukung pembangunan kemandirian mereka melalui organisasi. *Kedua*, proses pemberdayaan

dengan kecenderungan sekunder menekankan pada proses menstimulasi, mendorong, atau memotivasi agar individu mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog.

Seringkali kecenderungan primer terwujud melalui kecenderungan sekunder terlebih dahulu. Selanjutnya disebutkan bahwa proses pemecahan masalah berbasiskan pemberdayaan masyarakat yang berdasarkan prinsip berbeda bersama masyarakat menyadari bahwa masyarakat mempunyai hak-hak yang harus dihargai, sehingga masyarakat lebih mampu mengenali kebutuhannya dan dilatih untuk dapat merumuskan rencana serta melaksanakan pembangunan secara mandiri dan swadaya. Dalam hal ini, praktisi pembangunan berperan dalam memfasilitasi proses dialog, diskusi, curah pendapat, dan mensosialisasikan temuan masyarakat.

Menurut Mubyarto (1999), pemberdayaan masyarakat mengacu kepada kemampuan masyarakat untuk mendapatkan dan memanfaatkan akses dan kontrol atas sumber hidup yang penting. Proses pemberdayaan merupakan wujud perubahan sosial yang menyangkut relasi antara lapisan sosial sehingga kemampuan individu “senasib” untuk saling berkumpul dalam suatu kelompok cenderung dinilai sebagai bentuk pemberdayaan yang paling efektif.

Pemberdayaan secara teoritik dianggap sebagai pendekatan yang situasional. Teori pemberdayaan telah berkembang dengan beraneka-

ragam pijakan dalam 20 tahun terakhir ini. Pemberdayaan dapat berarti sebagai suatu proses, suatu mekanisme dimana individu, organisasi dan masyarakat menjadi ahli akan masalah yang mereka hadapi. Teori pemberdayaan mengasumsikan bahwa (1) pemberdayaan akan berbeda bentuk untuk orang yang berbeda; (2) pemberdayaan akan berbeda bentuk untuk konteks yang berbeda; (3) pemberdayaan akan berfluktuasi atau berubah sejalan dengan waktu. Seseorang dapat merasa terberdayakan pada suatu saat dan tidak terberdayakan pada waktu yang lain, bergantung pada kondisi yang mereka hadapi pada suatu waktu. Para akademisi teori pemberdayaan menyatakan bahwa konsep pemberdayaan berlaku tidak hanya bagi individu sebagai kelompok, organisasi dan masyarakat, namun juga bagi individu itu sendiri (Fredman, 1998).

Secara konseptual, pemberdayaan atau pemberkuasaan (*empowerment*), berasal dari kata 'power' (kekuasaan atau keberdayaan). Karenanya, ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan konsep mengenai kekuasaan. Kekuasaan seringkali dikaitkan dengan kemampuan kita untuk membuat orang lain melakukan apa yang kita inginkan, terlepas dari keinginan dan minat mereka. Ilmu sosial tradisional menekankan bahwa kekuasaan berkaitan dengan pengaruh dan kontrol. Pengertian ini mengasumsikan bahwa kekuasaan sebagai sesuatu yang tidak berubah atau tidak dapat dirubah.

Kekuasaan sesungguhnya tidak terbatas pada pengertian di atas. Kekuasaan tidak vakum dan terisolasi. Kekuasaan senantiasa hadir dalam

konteks relasi sosial antar manusia. Kekuasaan tercipta dalam relasi sosial. Karena itu, kekuasaan dan hubungan kekuasaan dapat berubah. Dengan pemahaman kekuasaan seperti ini, pemberdayaan sebagai sebuah proses perubahan kemudian memiliki konsep yang bermakna. Dengan kata lain, kemungkinan terjadinya proses pemberdayaan sangat tergantung pada dua hal:

- 1) Bahwa kekuasaan dapat berubah. Jika kekuasaan tidak dapat berubah, pemberdayaan tidak mungkin terjadi dengan cara apapun.
- 2) Bahwa kekuasaan dapat diperluas. Konsep ini menekankan pada pengertian kekuasaan yang tidak statis, melainkan dinamis.

**a. Indikator Pemberdayaan**

Pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang-orang yang lemah atau tidak beruntung (Ife, 1995). Pemberdayaan menunjuk pada usaha pengalokasian kembali kekuasaan melalui pengubahan struktur sosial (Swift dan Levin (1987). Pemberdayaan adalah suatu cara dengan mana rakyat, organisasi, dan komunitas diarahkan agar mampu menguasai (atau berkuasa atas) kehidupannya (Rappaport, 1993). Pemberdayaan adalah sebuah proses dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam, berbagi pengontrolan atas, dan mempengaruhi terhadap, kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang

cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya (Rappaport, 1993).

Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah, untuk (a) memiliki akses terhadap sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-baran dan jasa-jasa yang mereka perlukan; dan (b) berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.

Berdasarkan definisi-definisi pemberdayaan di atas, dapat dinyatakan bahwa pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial; yaitu masyarakat miskin yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya. Pengertian pemberdayaan sebagai tujuan seringkali digunakan sebagai indikator keberhasilan pemberdayaan sebagai sebuah proses.

Schuler, Hashemi dan Riley mengembangkan beberapa indikator pemberdayaan, yang mereka sebut sebagai *empowerment index* atau indeks pemberdayaan Dwyer (2007):

- 1) Kebebasan mobilitas: kemampuan individu untuk pergi ke luar rumah atau wilayah tempat tinggalnya, seperti ke pasar, fasilitas medis, bioskop, rumah ibadah, ke rumah tetangga. Tingkat mobilitas ini dianggap tinggi jika individu mampu pergi sendirian
- 2) Kemampuan membeli komoditas 'kecil': kemampuan individu untuk membeli barang-barang kebutuhan keluarga sehari-hari (beras, minyak tanah, minyak goreng, bumbu); kebutuhan dirinya (minyak rambut, sabun mandi, rokok, bedak, sampo). Individu dianggap mampu melakukan kegiatan ini terutama jika ia dapat membuat keputusan sendiri tanpa meminta ijin pasangannya; terlebih jika ia dapat membeli barang-barang tersebut dengan menggunakan uangnya sendiri.
- 3) Kemampuan membeli komoditas 'besar': kemampuan individu untuk membeli barang-barang sekunder atau tersier, seperti lemari pakaian, TV, radio, koran, majalah, pakaian keluarga. Seperti halnya indikator di atas, poin tinggi diberikan terhadap individu yang dapat membuat keputusan sendiri tanpa meminta ijin pasangannya; terlebih jika ia dapat membeli barang-barang tersebut dengan menggunakan uangnya sendiri.

- 4) Terlibat dalam pembuatan keputusan-keputusan rumah tangga: mampu membuat keputusan secara sendiri maupun bersama suami/istri mengenai keputusan-keputusan keluarga, misalnya mengenai renovasi rumah, pembelian kambing untuk ditenak, memperoleh kredit usaha.
- 5) Kebebasan relatif dari dominasi keluarga: responden ditanya mengenai apakah dalam satu tahun terakhir ada seseorang (suami, istri, anak-anak, mertua) yang mengambil uang, tanah, perhiasan dari dia tanpa ijinnya; yang melarang mempunyai anak; atau melarang bekerja di luar rumah.
- 6) Kesadaran hukum dan politik: mengetahui nama salah seorang pegawai pemerintah desa/kelurahan; seorang anggota DPRD setempat; nama presiden; mengetahui pentingnya memiliki surat nikah dan hukum-hukum waris.
- 7) Keterlibatan dalam kampanye dan protes-protes: seseorang dianggap 'berdaya' jika ia pernah terlibat dalam kampanye atau bersama orang lain melakukan protes, misalnya, terhadap suami yang memukul istri; istri yang mengabaikan suami dan keluarganya; gaji yang tidak adil; penyalahgunaan bantuan sosial; atau penyalahgunaan kekuasaan polisi dan pegawai pemerintah.
- 8) Jaminan ekonomi dan kontribusi terhadap keluarga: memiliki rumah, tanah, asset produktif, tabungan. Seseorang dianggap



memiliki poin tinggi jika ia memiliki aspek-aspek tersebut secara sendiri atau terpisah dari pasangannya.

#### **b. Pendekatan Pemberdayaan**

Menurut Ife (1995), pemberdayaan memuat dua pengertian kunci, yakni kekuasaan dan kelompok lemah. Kekuasaan di sini diartikan bukan hanya menyangkut kekuasaan politik dalam arti sempit, melainkan kekuasaan atau penguasaan klien atas:

- 1) Pilihan-pilihan personal dan kesempatan-kesempatan hidup: kemampuan dalam membuat keputusan-keputusan mengenai gaya hidup, tempat tinggal, pekerjaan.
- 2) Pendefinisian kebutuhan: kemampuan menentukan kebutuhan selaras dengan aspirasi dan keinginannya.
- 3) Ide atau gagasan: kemampuan mengekspresikan dan menyumbangkan gagasan dalam suatu forum atau diskusi secara bebas dan tanpa tekanan.
- 4) Lembaga-lembaga: kemampuan menjangkau, menggunakan dan mempengaruhi pranata-pranata masyarakat, seperti lembaga kesejahteraan sosial, pendidikan, kesehatan.
- 5) Sumber-sumber: kemampuan memobilisasi sumber-sumber formal, informal dan kemasyarakatan.
- 6) Aktivitas ekonomi: kemampuan memanfaatkan dan mengelola mekanisme produksi, distribusi, dan pertukaran barang serta jasa.

- 7) Reproduksi: kemampuan dalam kaitannya dengan proses kelahiran, perawatan anak, pendidikan dan sosialisasi.

Pelaksanaan proses dan pencapaian tujuan pemberdayaan di atas dicapai melalui penerapan pendekatan pemberdayaan. Dwyer (2007) menyatakan, bahwa proses pemberdayaan umumnya dilakukan secara kolektif. Menurutnya, tidak ada literatur yang menyatakan bahwa proses pemberdayaan terjadi dalam relasi satu-lawan-satu antara pekerja sosial dan klien dalam setting pertolongan perseorangan. Meskipun pemberdayaan seperti ini dapat meningkatkan rasa percaya diri dan kemampuan diri klien, hal ini bukanlah strategi utama pemberdayaan.

Namun demikian, tidak semua intervensi pekerjaan sosial dapat dilakukan melalui kolektivitas. Dalam beberapa situasi, strategi pemberdayaan dapat saja dilakukan secara individual; meskipun pada gilirannya strategi ini pun tetap berkaitan dengan kolektivitas, dalam arti mengkaitkan klien dengan sumber atau sistem lain di luar dirinya. Karenanya, dalam konteks pekerjaan sosial, pemberdayaan dapat dilakukan melalui tiga pendekatan: mikro, mezzo, dan makro.

- 1) Pendekatan Mikro. Pemberdayaan dilakukan terhadap klien secara individu melalui bimbingan, konseling, stress management, *crisis intervention*. Tujuan utamanya adalah membimbing atau melatih klien dalam menjalankan tugas-tugas kehidupannya. Model ini

sering disebut sebagai Pendekatan yang Berpusat pada Tugas (*task centered approach*).

- 2) Pendekatan Mezzo. Pemberdayaan dilakukan terhadap sekelompok klien. Pemberdayaan dilakukan dengan menggunakan kelompok sebagai media intervensi. Pendidikan dan pelatihan, dinamika kelompok, biasanya digunakan sebagai strategi dalam meningkatkan kesadaran, pengetahuan, keterampilan dan sikap-sikap klien agar memiliki kemampuan memecahkan permasalahan yang dihadapinya.
- 3) Pendekatan Makro. Pendekatan ini disebut juga sebagai Strategi Sistem Besar (*large-system strategy*), karena sasaran perubahan diarahkan pada sistem lingkungan yang lebih luas. Perumusan kebijakan, perencanaan sosial, kampanye, aksi sosial, *lobbying*, pengorganisasian masyarakat, manajemen konflik, adalah beberapa strategi dalam pendekatan ini. Pendekatan ini memandang klien sebagai orang yang memiliki kompetensi untuk memahami situasi-situasi mereka sendiri, dan untuk memilih serta menentukan strategi yang tepat untuk bertindak.

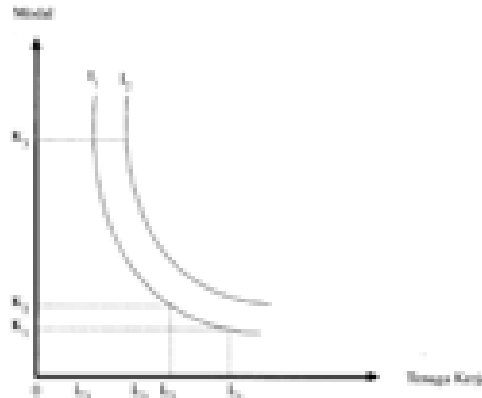
## 2. Teori Pertumbuhan dan Perkembangan Ekonomi Neo Klasik

Teori pertumbuhan ekonomi Neo Klasik berkembang sejak tahun 1950-an. Teori ini berkembang berdasarkan analisis-analisis mengenai pertumbuhan ekonomi menurut pandangan ekonomi Klasik. Ekonomi yang menjadi perintis dalam mengembangkan teori tersebut adalah Robert

Solow (Massachusetts Institute of Technology) dan Trevor Swan (Australia National University). Solow ini memenangkan hadiah Nobel Ekonomi tahun 1987 atas karyanya tentang teori pertumbuhan ekonomi ini.

Menurut teori ini, pertumbuhan ekonomi tergantung kepada penambahan penyediaan faktor-faktor produksi (penduduk, tenaga kerja, dan akumulasi modal) dan tingkat kemajuan teknologi. Pandangan ini didasarkan kepada anggapan yang mendasari analisis Klasik, yaitu perekonomian akan tetap mengalami tingkat pengerjaan penuh (full employment) dan kapasitas peralatan modal akan tetap sepenuhnya digunakan sepanjang waktu. Dengan kata lain, sampai dimana perekonomian akan berkembang tergantung pada penambahan penduduk, akumulasi modal, dan kemajuan teknologi.

Selanjutnya menurut teori ini, rasio modal-output (capital-output ratio =COR) bisa berubah. Dengan kata lain, untuk menciptakan sejumlah output tertentu, bisa digunakan jumlah modal yang berbeda-beda dengan bantuan tenaga kerja yang jumlahnya berbedabeda pula, sesuai dengan yang dibutuhkan. Jika lebih banyak modal yang digunakan, maka tenaga kerja yang dibutuhkan lebih sedikit. Sebaliknya jika modal yang digunakan lebih sedikit, maka lebih banyak tenaga kerja yang digunakan. Dengan adanya "keluwesan" (fleksibilitas) ini suatu perekonomian mempunyai kebebasan yang tak terbatas dalam menentukan kombinasi modal dan tenaga kerja yang akan digunakan untuk menghasilkan tingkat output tertentu.



Gambar 1.  
Fungsi Produksi Neo Klasik

Sifat teori pertumbuhan Neo Klasik bisa digambarkan seperti pada Gambar 1. Fungsi produksinya ditunjukkan oleh  $L_1$ ,  $L_2$ , dan seterusnya. Dalam fungsi produksi yang berbentuk demikian, suatu tingkat output tertentu dapat diciptakan dengan menggunakan berbagai kombinasi modal dan tenaga kerja. Misalnya untuk menciptakan output sebesar  $I_1$  kombinasi modal dan tenaga kerja yang dapat digunakan antara lain (a)  $K_3$  dengan  $L_3$  (b)  $K_2$  dengan  $L_2$ , dan (c)  $K_1$ , dengan  $L_1$ . Dengan demikian, walaupun jumlah modal berubah tetapi terdapat kemungkinan bahwa tingkat output tidak mengalami perubahan.

Jumlah output dapat mengalami perubahan walaupun jumlah modal tetap. Misalnya walaupun jumlah modal tetap sebesar  $K$ , jumlah output dapat diperbesar menjadi  $I_2$ , jika tenaga kerja digunakan ditambah dari  $L_3$  menjadi  $L_2$ .

Teori pertumbuhan Neo Klasik ini mempunyai banyak variasi, tetapi pada umumnya mereka didasarkan kepada fungsi produksi yang telah dikembangkan oleh Charles Cobb dan Paul Douglas yang sekarang dikenal sebutan fungsi produksi Cobb- Douglas. Fungsi tersebut bisa dituliskan dengan cara berikut:

$$Q = T_t^a K_t^b L_t^c$$

di mana:

- Qt = tingkat produksi pada tahun  $t$
- Tt = tingkat teknologi pada tahun  $t$
- Kt = jumlah stok barang modal pada tahun  $t$
- Lt = jumlah tenaga kerja pada tahun  $t$
- a = pertambahan output yang diciptakan oleh pertambahan satu unit modal.
- b = pertambahan output yang diciptakan oleh pertambahan satu unit tenaga kerja.

Nilai Tt, a dan b bisa diestimasi secara empiris. Tetapi pada umumnya nilai a dan b ditentukan saja besarnya, dengan menganggap bahwa  $a + b = 1$ , yang berarti bahwa a dan b nilainya adalah sama dengan produksi batas dari masing- masing faktor produksi tersebut. Dengan kata lain, nilai a dan b ditentukan dengan melihat peranan tenaga kerja dan modal dalam menciptakan output.

### 3. Pandangan Teoritis Mengenai Kemiskinan.

Kemiskinan merupakan masalah kemanusiaan yang telah lama diperbincangkan karena berkaitan dengan tingkat kesejahteraan masyarakat dan upaya penanganannya. Dalam Panduan Keluarga Sejahtera (1996: 10) kemiskinan adalah suatu keadaan dimana seorang

*commit to user*

tidak sanggup memelihara dirinya sendiri dengan taraf kehidupan yang dimiliki dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga, mental maupun fisiknya dalam memenuhi kebutuhannya. Dalam Panduan PNPM (1993: 26) bahwa kemiskinan adalah situasi serba kekurangan yang terjadi bukan karena dikehendaki oleh si miskin, melainkan karena tidak dapat dihindari dengan kekuatan yang ada padanya.

Kemiskinan ini ditandai oleh sikap dan tingkah laku yang menerima keadaan yang seakan-akan tidak dapat diubah yang tercermin di dalam lemahnya kemauan untuk maju, rendahnya kualitas sumber daya manusia, lemahnya nilai tukar hasil produksi, rendahnya produktivitas, terbatasnya modal yang dimiliki berpartisipasi dalam pembangunan. Mengamati secara mendalam tentang kemiskinan dan penyebabnya akan muncul berbagai tipologi dan dimensi kemiskinan karena kemiskinan itu sendiri multikompleks, dinamis, dan berkaitan dengan ruang, waktu serta tempat dimana kemiskinan dilihat dari berbagai sudut pandang. Kemiskinan dibagi dalam dua kriteria yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif.

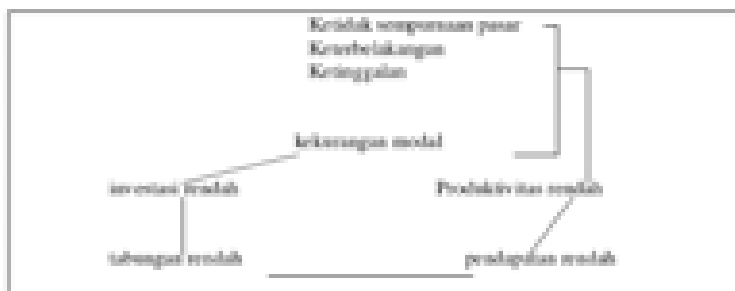
Kemiskinan absolut adalah kemiskinan yang diukur dengan tingkat pendapatan yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya sedangkan kemiskinan relatif adalah penduduk yang telah memiliki pendapatan sudah mencapai kebutuhan dasar namun jauh lebih rendah dibanding keadaan masyarakat sekitarnya. Kemiskinan menurut tingkatan kemiskinan adalah kemiskinan sementara dan kemiskinan kronis.

Kemiskinan sementara yaitu kemiskinan yang terjadi sebab adanya bencana alam dan kemiskinan kronis yaitu kemiskinan yang terjadi pada mereka yang kekurangan ketrampilan, aset, dan stamina (Aisyah, 2001: 151). Penyebab kemiskinan menurut Kuncoro (2000: 107) sebagai berikut:

- 1) Secara makro, kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan timpang, penduduk miskin hanya memiliki sumber daya dalam jumlah yang terbatas dan kualitasnya rendah.
- 2) Kemiskinan muncul akibat perbedaan kualitas sumber daya manusia karena kualitas sumber daya manusia yang rendah berarti produktivitas juga rendah, upahnya pun rendah;
- 3) kemiskinan muncul sebab perbedaan akses dan modal.

Ketiga penyebab kemiskinan itu bermuara pada teori lingkaran setan kemiskinan (*vicious circle of poverty*) lihat Gambar 1. Adanya keterbelakangan, ketidak-sempurnaan pasar, kurangnya modal menyebabkan rendahnya produktivitas. Rendahnya produktivitas mengakibatkan rendahnya pendapatan yang mereka terima. Rendahnya pendapatan akan berimplikasi pada rendahnya tabungan dan investasi, rendahnya investasi akan berakibat pada keterbelakangan dan seterusnya. Logika berpikir yang dikemukakan Nurkse yang dikutip Kuncoro (2000: 7) yang mengemukakan bahwa negara miskin itu miskin karena dia miskin (*a poor country is poor because it is poor*)





Gambar 1 : Lingkaran setan kemiskinan (*The vicious circle of poverty*)

Sumber : Kuncoro (2000)

Menurut Bayo (1996: 18) yang mengutip pendapat Chambers bahwa ada lima “ketidakberuntungan” yang melingkari orang atau keluarga miskin yaitu sebagai berikut:

- 1) Kemiskinan (*poverty*) memiliki tanda-tanda sebagai berikut: rumah mereka reot dan dibuat dari bahan bangunan yang bermutu rendah, perlengkapan yang sangat minim, ekonomi keluarga ditandai dengan ekonomi gali lubang tutup lubang serta pendapatan yang tidak menentu;
- 2) Masalah kerentanan (*vulnerability*), kerentanan ini dapat dilihat dari ketidakmampuan keluarga miskin menghadapi situasi darurat. Perbaikan ekonomi yang dicapai dengan susah payah sewaktu-waktu dapat lenyap ketika penyakit menghampiri keluarga mereka yang membutuhkan biaya pengobatan dalam jumlah yang besar;
- 3) Masalah ketidakberdayaan. Bentuk ketidakberdayaan kelompok miskin tercermin dalam ketidakmampuan mereka dalam menghadapi elit dan para birokrasi dalam menentukan keputusan yang

menyangkut nasibnya, tanpa memberi kesempatan untuk mengaktualisasi dirinya;

- 4) Lemahnya ketahanan fisik karena rendahnya konsumsi pangan baik kualitas maupun kuantitas sehingga konsumsi gizi mereka sangat rendah yang berakibat pada rendahnya produktivitas mereka;
- 5) Masalah keterisolasian. Keterisolasian fisik tercermin dari kantong-kantong kemiskinan yang sulit dijangkau sedang keterisolasian social tercermin dari ketertutupan dalam integrasi masyarakat miskin dengan masyarakat yang lebih luas.

Dari berbagai teori yang ada bahwa kemiskinan itu adalah mereka yang tak mampu memiliki penghasilan yang layak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Mereka membutuhkan uluran tangan dan bantuan orang lain mencukupi kebutuhannya.

#### **4. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)**

##### **1) Pengertian PNPM**

PNPM Mandiri adalah gerakan nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk menciptakan/meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individumaupun berkelompok, dalam memecahkan berbagai

persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraannya (Pedum, 2007).

Melalui PNPM Mandiri dilakukan harmonisasi dan pengembangan sistem serta mekanisme dan prosedur program, penyediaan pendampingan, dan pendanaan stimulan untuk mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan. Keterlibatan yang lebih besar dari perangkat pemerintah daerah serta berbagai pihak untuk memberikan kesempatan, dan menjamin keberlanjutan berbagai hasil yang dicapai menjadi kunci keberhasilan proses pemberdayaan masyarakat (Pedum, 2007).

PNPM merupakan program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. Program ini berupaya untuk menciptakan/ meningkatkan kualitas masyarakat, baik secara individu maupun kelompok dalam memecahkan berbagai persoalan terkait pada upaya untuk meningkatkan kualitas kehidupan, kemandirian dan kesejahteraan.

PNPM merupakan salah satu dari berbagai program penanggulangan kemiskinan yang dirancang berdasarkan pembelajaran terbaik pelaksanaan program-program pemberdayaan masyarakat selama ini. Selain program-program berbasis pemberdayaan, masih terdapat program penanggulangan kemiskinan lainnya yang diperuntukkan langsung bagi rumah tangga miskin,

seperti Program Beras Miskin (Raskin), Asuransi Kesehatan Keluarga Miskin (Askeskin) dan Program Keluarga Harapan, serta program-program terkait penyediaan kredit mikro dan pembinaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

## 2) Tujuan PNPM

Tujuan umum PNPM adalah meningkatnya kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin secara mandiri. Tujuan khusus dari PNPM antara lain :

- 1) Meningkatnya partisipasi seluruh masyarakat, termasuk masyarakat miskin, kelompok perempuan, komunitas adat terpencil, dan kelompok masyarakat lainnya yang rentan dan sering terpinggirkan ke dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan.
- 2) Meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat yang mengakar, representatif, dan akuntabel.
- 3) Meningkatnya kapasitas pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terutama masyarakat miskin melalui kebijakan, program dan penganggaran yang berpihak pada masyarakat miskin (*pro-poor*).
- 4) Meningkatnya sinergi masyarakat, pemerintah daerah dan kelompok peduli (swasta, asosiasi, perguruan tinggi, media,

LSM, dll) untuk mengefektifkan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan.

- 5) Meningkatnya keberdayaan dan kemandirian masyarakat, serta kapasitas pemerintah daerah dan kelompok peduli setempat dalam menanggulangi kemiskinan di wilayahnya.
- 6) Meningkatnya modal sosial masyarakat yang berkembang sesuai dengan potensi sosial dan budaya serta untuk melestarikan kearifan lokal.
- 7) Meningkatnya inovasi dan pemanfaatan teknologi tepat guna, informasi dan komunikasi dalam pemberdayaan masyarakat.

### 3) Sejarah PNPM

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) diluncurkan Pemerintah pada bulan Agustus 2006 dan dilaksanakan di 70.000 desa selama tiga tahun, dari tahun 2007 sampai 2009. Pada tahun pertama PNPM dilaksanakan di hampir 2.000 kecamatan pedesaan dan kemudian pada tahun 2008 di 3.600 kecamatan. Sedangkan kecamatan-kecamatan sisanya dilaksanakan pada tahun 2009. Secara umum PNPM dimaksudkan untuk mengurangi kemiskinan melalui peningkatan partisipasi masyarakat di dalam proses pembangunan, peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam penyediaan layanan umum, dan peningkatan kapasitas lembaga lokal yang berbasis masyarakat.

PNPM diharapkan dapat meningkatkan sinergi antara masyarakat dan pemerintah daerah dalam rangka lebih mengefektifkan upaya-upaya pengurangan kemiskinan. Secara khusus, PNPM yang mempunyai target untuk menurunkan jumlah serta meningkatkan partisipasi orang miskin tersebut mempunyai tujuan sebagai berikut:

2. Mengembangkan kapasitas masyarakat, terutama Rumah Tangga Miskin (RTM) dengan penyediaan prasarana sarana sosial dasar dan ekonomi, serta lapangan kerja.
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat miskin dalam pengambilan keputusan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelestarian kegiatan pembangunan.
4. Mengembangkan kapasitas pemerintahan lokal dalam memfasilitasi penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan.

## **B. Penelitian Terdahulu**

Hasil penelitian Ullah, and Jayant K. (2007), yang menganalisis situasi kemiskinan dan upaya pengentasan kemiskinan dari LSM di Bangladesh dengan penekanan pada dua dampak program LSM di dua desa di distrik Barisal menemukan bahwa kondisi ekonomi masyarakat miskin di wilayah studi belum membaik banyak dilihat dari beberapa indikator yang dipilih, yaitu, pendapatan, makanan dan pengeluaran non-pangan, produktif dan non-aset produktif, ketahanan pangan, dan penciptaan lapangan kerja.

The Foster Greer Thorbecke indeks menunjukkan bahwa mayoritas LSM penerima manfaat tetap di bawah garis kemiskinan dari segi pendapatan dan mayoritas dari mereka tetap di bawah garis setengah pengangguran (kurang dari 260 hari kerja dalam satu tahun). Analisis regresi menunjukkan bahwa pendapatan rumah tangga ditentukan oleh ukuran pemilikan tanah, tenaga kerja keluarga, jumlah pinjaman yang diambil dan kesempatan kerja.

Hasil penelitian Coate, Handmer and Wei, (2006), yang mengeksplorasi peranan LSM dalam memfasilitasi pemulihan ekonomi akibat tsunami yang menghancurkan daerah-daerah di selatan Thailand. Hal ini termasuk LSM internasional yang besar maupun kecil berbasis masyarakat atau LSM lokal dan bagaimana organisasi-organisasi ini terlibat dengan satu sama lain termasuk dengan pemerintah dengan tujuan untuk membantu pemulihan masyarakat setempat. Secara khusus, fokus penelitian dititikberatkan pada bagaimana LSM dapat membantu penduduk setempat, terutama mereka yang terlibat dalam sektor informal dalam membangun kembali mata pencaharian mereka di daerah yang telah hancur oleh bencana alam.

Mengingat bahwa di Thailand hanya sekitar 70 persen dari penduduk bekerja di sektor ekonomi informal, salah satu penemuan yang penting adalah bahwa pusat pemulihan ekonomi adalah kebutuhan untuk mengarahkan para pembuat kebijakan strategi pemulihan untuk mencerminkan langkah-langkah yang secara luas mendukung sektor informal di berbagai industri termasuk pariwisata dan perikanan, dan yang akan memberikan dasar mata pencaharian

ekonomi bagi sebagian besar penduduk Thailand yang terkena bencana. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi pemulihan harus terlibat dengan dan langsung melibatkan masyarakat untuk memastikan pemulihan ekonomi jangka panjang yang mampu membangun ketahanan lokal dan menyediakan dukungan mata pencaharian dasar bagi keberlanjutan masa depan penduduk setempat.

Gehlich-Shillabeer (2008) dalam penelitiannya menemukan bahwa selama beberapa tahun terakhir di Bangladesh penggunaan pencegahan dan penanggulangan strategi kemiskinan telah menurun. Paling banyak alasan untuk hal ini adalah kendala keuangan sebagai akibat penurunan pendapatan masyarakat pedesaan meski kehadiran MCOs besar di negara itu. Dalam rangka mengatasi kelangkaan uang tunai banyak orang telah menggunakan pinjaman dari berbagai sumber, yang telah menjadi efektif satu strategi penanggulangan yang paling penting digunakan. Dalam hubungannya dengan menurunkan kapasitas utang dan syarat-syarat pencairan kredit yang ketat, utang yang lebih tinggi, adalah hasil menciptakan potensi perangkap kemiskinan. Temuan dari Bangladesh menunjukkan bahwa meskipun panjang lebar keberadaan dan ketersediaan kredit mikro banyak orang yang tidak menghasilkan pendapatan yang cukup untuk menjadi mandiri.

Basu (2007) telah mencoba membandingkan strategi pembangunan dan prestasi dari India dan Cina dalam 50 tahun terakhir dan untuk menganalisis tantangan tergeletak di depan jika tren ini terus berlanjut. Transformasi ekonomi yang pesat di India dan Cina dalam beberapa tahun



terakhir telah mengubah mereka menjadi dua dunia yang paling kuat dan eye-catching entitas ekonomi. Prospek mereka, kemungkinan kerja sama dan persaingan yang sedang dibahas oleh para akademisi, wartawan, pakar dan politisi. Analisis percaya bahwa kedua negara telah banyak memberikan kontribusi bagi ekonomi dunia saat mereka bergerak maju. Meskipun dua raksasa ekonomi memiliki potensi untuk mendominasi pandangan ekonomi global di abad saat ini, ada beberapa tantangan dalam proses mengubah potensi menjadi kenyataan Basu (2007).

Dua ekonomi yang paling padat penduduknya di dunia memiliki lebih banyak perbedaan daripada kemiripan dalam proses pertumbuhan ekonomi. Sebagian besar kesamaan yang umum untuk orang-orang yang padat penduduknya dan negara berkembang pada umumnya. Tapi mereka sistem ekonomi yang berbeda di masa lalu dan yang seharusnya secara signifikan mempengaruhi prestasi ekonomi mereka di masa depan. Dengan sosio-ekonomi yang berbeda-set-up politik Cina dan India mengikuti pendekatan pembangunan yang berbeda sejauh ini. Tidak mungkin untuk mengomentari keunggulan satu di atas yang lain, seperti latar belakang mereka berbeda. Hal ini tentu menguntungkan bagi kedua ekonomi untuk bekerja sama daripada bersaing di pasar internasional. Dalam hal ini Cina dan India mungkin akan membuat ekonomi, perdagangan dan potensi ekspor tetangga mereka di Asia yang dapat menemukan kedua negara menjadi pasar menguntungkan bukan saingan (Basu, 2007).

Hasil penelitiannya berdasarkan pengalaman pertumbuhan ekonomi sejauh ini dengan direformasi dan perekonomian terbuka, Indonesia dapat belajar beberapa hal dari Cina. Cina telah mencapai hasil yang lebih baik berdasarkan investasi berbasis kebijakan yang berorientasi ekspor yang mungkin tidak berkelanjutan dalam jangka panjang. Sejauh ini mengabaikan isu-isu sosial-politik, yang dapat memiliki konsekuensi yang sangat serius di masa depan. Relatif lebih lambat pertumbuhan ekonomi di India didasarkan pada yayasan sosio-ekonomi yang lebih kuat. Kerjasama ekonomi yang saling menguntungkan antara kedua ekonomi dan meningkatnya saling ketergantungan dengan kekuatan regional dan global harus menyediakan masa depan yang lebih baik (Basu, 2007).

Dengan globalisasi ekonomi, Cina dan India yang menjadi mesin pertumbuhan global baru pada abad ini. Saling menguntungkan kerjasama ekonomi antara dua perekonomian dan meningkatnya saling ketergantungan dengan kekuatan regional dan global akan memberikan masa depan yang lebih baik. Meningkatnya raksasa di Asia mungkin tantangan dunia yang ada dominasi oleh komunitas trans-Atlantik di tahun-tahun mendatang. Meskipun Cina dan India dianggap sebagai produsen dan konsumen kebanyakan ekonomi, masing-masing, keduanya mengembangkan daerah mereka kurang. Dengan pasar domestik yang besar dan kelimpahan tenaga kerja terampil bangsa-bangsa memiliki potensi untuk menimbulkan tantangan serius bagi perekonomian global. Tapi mereka tidak perlu kerjasama dan kompetisi di antara mereka sendiri. Yang akan memungkinkan mereka untuk bersaing

lebih efektif dengan negara adikuasa yang ada. Setelah periode panjang ketidakpedulian, awal positif telah dimulai oleh dua ekonomi baru-baru ini untuk membuka bidang kerjasama ekonomi. Pengetahuan industri berbasis muncul sebagai fokus bisnis dunia untuk abad ini, dan India dan Cina dapat memiliki cakupan yang luar biasa saling mendukung satu sama lain dalam bidang tertentu ini.

Pertumbuhan yang kuat di India kegiatan perangkat lunak dapat menyesuaikan hardware sangat baik dengan fasilitas produksi di Cina. Berdasarkan pengalaman pertumbuhan ekonomi sejauh ini dengan direformasi dan perekonomian terbuka, Indonesia dapat belajar beberapa hal dari Cina. Cina sejauh ini telah berhasil perekonomian sangat baik dan dimanfaatkan sumber daya dan keterampilan dengan cara terbaik. Ini telah mencapai hasil yang lebih baik berdasarkan didorong investasi-kebijakan yang berorientasi ekspor yang mungkin tidak berkelanjutan dalam jangka panjang. Tetapi telah mengabaikan isu-isu sosial-politik dan yang dapat memiliki konsekuensi yang sangat serius dalam proses perkembangan ekonomi di masa depan. India memiliki kekuatan dalam bidang tertentu ini. Yang relatif lebih lambat laju pertumbuhan kuat didasarkan pada Yayasan sosial-ekonomi.

### **C. Kerangka Pemikiran**

Berbagai program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan seperti halnya PNPM Mandiri Perdesaan, Gerdu Taskin Pola Mandiri melalui

APBD hingga saat ini, rata-rata terlaksana dengan baik. Meskipun ada sebagian pelaksanaan utamanya untuk kegiatan fisik yang belum tuntas, namun rata-rata sudah mendekati final. "Setidaknya ada beberapa Desa, pelaksanaannya bahkan melebihi dari target yang ditentukan. Itu semua karena partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan sarana di Desanya.

Karena itu diharapkan, setelah seratus persen pelaksanaan pembangunan berbagai sarana fisik itu sudah bisa difungsikan, masyarakat dapat lebih mudah dalam memperoleh fasilitas seperti yang diharapkan. Misalnya saja, untuk pelayanan kesehatan di daerah yang cukup terpencil sudah bisa terlayani dengan baik di Polindes. Serta fasilitas jalan seperti pengerasan dan pengaspalan sudah mulai menyisir lokasi yang selama ini sulit dilalui sebagai transportasi masyarakat pedesaan (Adjie, 2010).

Pelaksanaan program PNPM sesuai dengan panduan PNPM bersifat terbuka dan berkesinambungan melalui pendekatan sebagai berikut:

- 1) Keterpaduan yaitu mengarahkan kegiatan pembangunan secara lintas sektoral dan lintas daerah serta meletakkan upaya penanggulangan kemiskinan sebagai bagian dari proses pembangunan yang menyeluruh dan terpadu.
- 2) Kegotongroyongan yaitu menumbuhkan rasa kebersamaan, yang lebih kuat membantu yang lemah sehingga menciptakan kesejahteraan bersama.
- 3) Keswadayaan yaitu menitikberatkan pada usaha yang berdasarkan kemandirian.

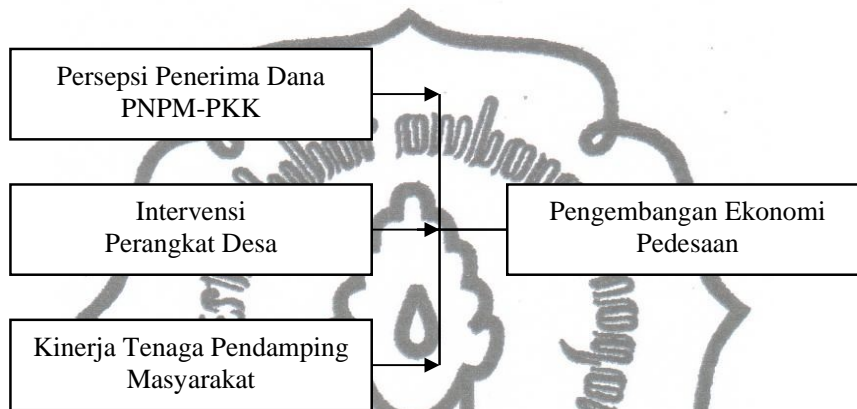
- 4) Partisipatif yaitu melibatkan warga masyarakat khususnya kelompok sasaran dalam pengambilan keputusan sejak perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemerataan hasil sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dan berkembang di masyarakat itu sendiri.
- 5) Terdesentralisasi yaitu menurunkan wewenang pembuatan keputusan, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan kepada aparat pemerintah yang terdekat dengan penduduk miskin.

Bentuk partisipasi dalam pelaksanaan program PNPM terutama menyusun, membuat perencanaan, pengambilan keputusan, penerimaan hasil keputusan musyawarah kelompok, menerima dengan syarat atau menolak sebagai perwujudan jalannya demokrasi kelompok. Hasil keputusan kelompok yang ditetapkan merupakan komitmen kelompok dalam pelaksanaan dan menerima hasil yang telah dicapai.

Keberhasilan program PNPM sangat ditentukan oleh keterlibatan secara aktif anggota pokmas secara keseluruhan yang berdampak pada peningkatan pendapatan penduduk miskin di desa. Penduduk miskin yang tergabung dalam pokmas PNPM harus memainkan peran aktif dalam kelompok usaha produktif yang dikembangkan di desa. Peran aktif tersebut dapat berupa saling memberi informasi tentang pasar, mematuhi kewajiban kelompok yang telah disepakati bersama dan saling menguntungkan di antara kelompok dan masyarakat pada umumnya.

Melalui pemberdayaan, masyarakat akan mampu menilai lingkungan sosial ekonominya serta mampu mengidentifikasi bidang-

bidang yang perlu dilakukan perbaikan. Berdasarkan uraian di atas, kerangka pemikiran penelitian dalam penelitian ini ditunjukkan pada Gambar 2.



Gambar 2 : Kerangka pemikiran penelitian

Kerangka konseptual tersebut didasarkan pada kondisi upaya pemberdayaan kegiatan ekonomi keluarga pada PNPM-PKK beberapa desa Kabupaten Sragen belum menunjukkan hasil yang baik. Dalam penelitian ini beberapa faktor yang mungkin mempengaruhi pelaksanaan program tersebut terdiri dari tingkat pendidikan penerima program yang rendah sehingga tidak mampu menyerap atau mengikuti model pelatihan yang diberikan, faktor pasar, intervensi perangkat desa yang dominan sehingga menghambat proses partisipasi dari pokmas, kinerja dari tenaga pendamping masyarakat yang tidak maksimal, persepsi dari penerima program yang keliru terhadap program sehingga cenderung untuk melanggar ketentuan yang ditetapkan.

Faktor pendidikan dan kondisi pasar tidak diperhatikan atau diteliti pada penelitian ini. Hal ini disebabkan karena tingkat pendidikan dari kelompok sasaran relatif homogen yakni tergolong rendah, sehingga diasumsikan tingkat penyerapan materi dianggap sama. Hal yang sama juga diberlakukan terhadap faktor kondisi pasar.

#### **D. Hipotesis**

Berdasarkan pada kerangka konseptual tersebut maka dapat dibuat hipotesis penelitian sebagai berikut:

1. Ada pengaruh yang signifikan antara persepsi penerima program terhadap pengembangan ekonomi pedesaan pada program PNPM-PKK di Kabupaten Sragen.
2. Ada pengaruh yang signifikan antara intervensi perangkat desa terhadap pengembangan ekonomi pedesaan pada program PNPM-PKK di Kabupaten Sragen.
3. Ada pengaruh yang signifikan antara kinerja tenaga pendamping masyarakat terhadap pengembangan ekonomi pedesaan pada program PNPM-PKK di Kabupaten Sragen.
4. Ada pengaruh yang signifikan antara persepsi penerima program, intervensi perangkat desa, dan kinerja tenaga pendamping masyarakat secara simultan (bersama-sama) terhadap pengembangan ekonomi pedesaan pada program PNPM-PKK di Kabupaten Sragen.

### BAB III

## METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian explanatif yakni suatu penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan pengaruh antar variabel penelitian yakni variabel bebas (X) yang meliputi persepsi penerima program, intervensi perangkat desa dan kinerja dari tenaga pedamping masyarakat dengan Variabel (Y) yakni pengembangan ekonomi pedesaan pada program PNPM-PKK di Kabupaten Sragen.

#### B. Populasi dan Sampel

Populasi adalah Keseluruhan dari obyek yang akan di teliti yang mempunyai ciri-ciri yang sama. Dalam penelitian ini populasi yang dimaksudkan adalah keseluruhan keluarga miskin yang menjadi sasaran program PNPM-PKK di wilayah Kabupaten Sragen.

Untuk menentukan jumlah sampel yang digunakan teknik cluster randome Sampling. Teknik *cluster random sampling* yakni teknik penentuan sampel dengan mengambil sampel berdasarkan cluster atau dikelompokkan dengan kategori tertentu. Karena penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji faktor-faktor yang menyebabkan keberhasilan program maka dalam penentuan sample diambil desa yang sudah berhasil.



### C. Variabel Penelitian

Variabel penelitian dalam penelitian meliputi dua variabel yakni:

1. Variabel bebas(X) yakni persepsi penerima program (X1), intervensi perangkat desa (X2), kinerja dari tenaga pendamping masyarakat(X3).
2. Variabel pengembangan ekonomi pedesaan (Y) sebagai variabel tergantung.

### D. Definisi operasional

1. Pengembangan ekonomi pedesaan adalah upaya yang dilakukan agar supaya keluarga mampu meningkatkan kemampuan ekonomi sehingga dapat memenuhi kebutuhan dasar, kebutuhan sosial, kebutuhan pengembangan dan mampu memberikan kontribusi bagi peningkatan taraf hidup keluarga. Dukungan atau upaya-upaya yang diberikan dalam pengembangan ekonomi pedesaan meliputi pemberian : keterampilan, pengembangan pengetahuan, sikap dan perilaku, manajemen usaha, peningkatan kualitas SDM keluarga,dukungan pendanaan, dan sebagainya. Indikator yang digunakan adalah : (1) Manfaat pelatihan (2) Pengusaan materi pelatihan (3) Kemampuan menggunakan manajemen usaha (4) Kesesuaian kebutuhan dana (5) Perubahan sikap (6) Komunikasi dalam kelompok (7) Intensitas pertemuan dalam kelompok (8) Kesadaran akan kesehatan (9) 11 Aspek peningkatan wawasan dan (10) Kemampuan menjalin hubungan (Pedum PNPM, 2009).

2. Kinerja Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM). Yaitu hasil kegiatan yang dilakukan oleh tenaga pendamping dalam melaksanakan proses pendampingan terhadap UPK, Pokmas dan Pemerintahan Desa dalam melaksanakan Program PNPM-PKK di Desa / Kelurahan, serta mendukung Tim Fasilitasi Kecamatan. Aktivitas tersebut meliputi proses sosialisasi, pelaksanaan, hingga sampai monitoring. Indikator yang digunakan adalah : (1) Kualitas pendamping program (2) Fungsi pendampingan dan (3) Lama aktifitas pendampingan (Pedum PNPM, 2009).
3. Intervensi perangkat desa adalah segala tindakan yang dilakukan untuk mencampuri urusan yang tidak menjadi wewenangnya(diluar tugasnya) dalam program PNPM-PKK di desa. Indikator yang digunakan adalah : (1) Transparansi penggunaan dana (2) Campur tangan dalam penetapan kelompok sasaran dan (3) Penentuan jenis kegiatan
4. Persepsi adalah proses pemberian arti terhadap lingkungan oleh seorang individu. Dalam kaitan dengan penelitian ini maka persepsi penerima program diartikan sebagai proses pemberian arti atau penilaian yang menghasilkan sebuah kesimpulan terhadap dana program yang diberikan kepada kelompok sasaran tersebut. Indikator yang digunakan adalah : Indikator yang digunakan adalah : (1) Efektifitas sosialisasi program (2) Keterlibatan kelompok sasaran (3) Pemahaman terhadap materi sosialisasi (4) Persepsi terhadap status dana pinjaman dan (5) Pandangan kelompok sasaran terhadap kegiatan yang dilakukan (Pedum PNPM, 2009).

## E. Analisis Data

### 1. Uji Instrumen Penelitian

#### a. Uji Validitas

Validitas menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukuran itu mengukur apa yang ingin diukur. Untuk mengetahui validitas, digunakan tehnik *Product Moment Correlation*, yaitu dengan mengkorelasikan skor antara item dengan skor total. Apabila hasil ukur sesuai dengan maksud dilakukannya pengukuran, maka dikatakan instrumen pengukur tersebut memiliki validitas yang tinggi. Cara yang dilakukan menggunakan analisis butir dan faktor dengan rumus korelasi product moment person, yaitu mengkorelasikan sikap setiap butir dan faktor dengan sikap penjumlahan semua skor butir dan skor faktor. Apabila hasil korelasi menunjukkan positif, hal ini berarti alat ukur yang digunakan valid dan akan semakin tinggi pula tingkat validitasnya apabila korelasi makin tinggi (mendekati 1,0). Korelasi dari masing-masing pertanyaan yang digunakan adalah korelasi product moment, dengan rumus:

$$r_{xy} = \frac{n(\sum xy) - (\sum x)(\sum y)}{\sqrt{\{n\sum x^2 - (\sum x)^2\} \{n\sum y^2 - (\sum y)^2\}}}$$

Keterangan:

$r_{xy}$  = koefisien korelasi skor item dengan skor total

n = jumlah subyek atau responden

x = skor item

y = skor total

Hasil r hitung kemudian dibandingkan dengan r tabel untuk

*commit to user*

selang kepercayaan 95% dengan derajat bebas (n-2). Jika nilai r hitung lebih besar dari r tabel maka dapat dikatakan bahwa item pertanyaan tersebut cukup valid sebagai alat ukur suatu instrumen (Arikunto, 2006).

#### b. Uji Reliabilitas

Reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukuran dapat dipercaya atau diandalkan. Apabila suatu alat ukur digunakan lebih dari sekali untuk mengukur gejala yang sama dan setelah pengukuran diperoleh hasil yang lebih konsisten, maka alat ukur tersebut dapat dikatakan reliabel. Pengukuran Reliabilitas menggunakan tehnik *Alpha Cronbach*. Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$r_{11} = \left( \frac{k}{k-1} \right) \left( 1 - \frac{\sum \gamma b^2}{\gamma t^2} \right)$$

Keterangan:

- $r_{11}$  = reliabilitas instrumen
- $k$  = banyaknya butir pertanyaan
- $\sum \gamma b^2$  = jumlah variabel butir
- $\gamma t^2$  = variabel total

Dalam penelitian ini pengujian reliabilitas menggunakan pendekatan rumus koefisien alpha ( $\alpha$ ) (Azwar, 2000:84). Semakin tinggi nilai koefisien alpha atau semakin mendekati 1,00 semakin tinggi pula tingkat reliabilitasnya. Untuk penelitian sosial nilai *Alpha*

*Cronbach* diatas 0,6 sudah menunjukkan tingkat kepercayaan atau diandalkan yang cukup baik.

## 2. Uji Hipotesis

Pengolahan dan analisis data dilakukan dengan menggunakan bantuan paket program komputer SPSS. Setelah dilaksanakan pengolahan data, maka selanjutnya dilakukan analisis data untuk mengetahui pengaruh dari variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat dengan menggunakan model analisis regresi linier berganda (*multiple regression analysis*) yang diolah melalui program SPSS. Model ini dipilih karena ingin mengetahui besarnya kontribusi pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat, baik secara parsial maupun secara bersama-sama. Setelah data diolah dan dianalisis secara kuantitatif, kemudian dilakukan analisis kualitatif untuk memberikan penjelasan atau makna dari analisis kuantitatif.

Adapun formula dari regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = b_0 + b_1 X_1 + b_2 X_2 + b_3 X_3 + e$$

Keterangan:

X1 = persepsi penerima program

X2 = intervensi perangkat desa

X3 = kinerja tenaga pendamping masyarakat

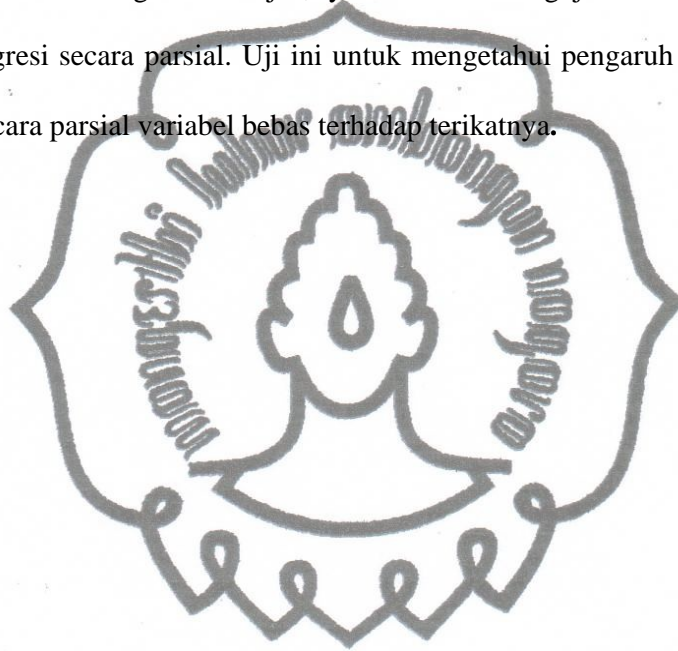
Y = Pengembangan ekonomi pedesaan

b0 = Konstanta (*interseption point*)

b1 , b2 , b3 = Koefisien regresi parsial

e = Pengganggu

Untuk membuktikan hipotesis dalam penelitian ini digunakan uji-F, yaitu untuk menguji keberartian koefisien regresi secara keseluruhan. Hal ini untuk mengetahui apakah seluruh variabel bebas secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat. Kemudian digunakan uji-t, yaitu untuk menguji keberartian koefisien regresi secara parsial. Uji ini untuk mengetahui pengaruh yang signifikan secara parsial variabel bebas terhadap terikatnya.



## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Pelaksanaan Penelitian

Pengambilan sampel berdasarkan teknik *cluster random sampling* yakni teknik penentuan sampel dengan mengambil sampel berdasarkan cluster atau dikelompokkan, dari 20 kecamatan di kabupaten Sragen, diambil 1 (satu) kecamatan, diperoleh kecamatan Kalijambe. Dari 14 (empat belas) desa di kecamatan kalijambe, diperoleh 15 responden dari pamong praja, dan 38 responden dari anggota kelompok UPPKS, dibawah binaan PKK kecamatan Kalijambe mulai tanggal 10 – 20 Juni 2010 . Pengambilan data digunakan untuk :

1. Mengetahui respon dan persepsi perangkat desa terhadap pelaksanaan PNPM.
2. Mengetahui karakteristik anggota kelompok UPPKS pemanfaatan dana PNPM pada program PPK di Kabupaten Sragen.
3. Mengetahui partisipasi masyarakat terhadap program PNPM.
4. Mengetahui pemanfaatan PNPM oleh anggota kelompok UPPKS di Kabupaten Sragen.
5. Mengetahui pengaruh persepsi penerima program PNPM-PKK, intervensi perangkat desa dan kinerja tenaga pedamping masyarakat terhadap pengembangan ekonomi pedesaan pada PNPM-PKK pengentasan kemiskinan di Kabupaten Sragen.

Pengambilan data melalui wawancara dengan pamong praja dilaksanakan di kantor desa setempat. Data asal desa dan jabatan pamong praja, ditunjukkan Tabel 1. Gambar 3 menunjukkan proses wawancara dan pengisian kuesioner oleh pamong praja.

Tabel 1  
Asal Desa dan Jabatan Pamong praja

Desa	Jabatan
Donoyudan	Kades
Keden	Kades
Saren	Kades
Ngebung	Kades
Krikilan	Kadus
Sambirembe	Kadus
Keden	Kadus
Krikilan	Kaur Ekbang
Trobayan	Kaur Ekbang
Sambirembe	Kaur Ekbang
JetisKarangpung	Jogo Boyo
Ngebung	Bendahara Desa
Trobayan	Jogo Boya
Trobayan	Pamong Tani Desa
Kalimacan	Pamong Tani Desa

Sumber : Data primer diolah (2010)

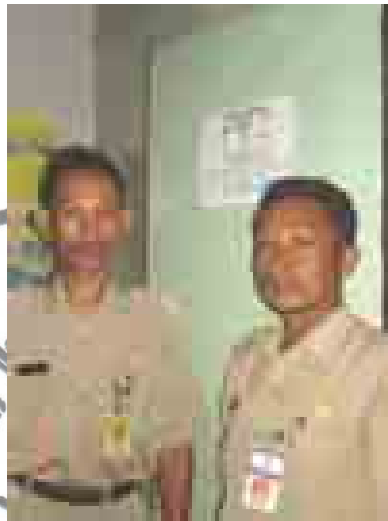


Gambar 3: Wawancara dan pengisian kuesioner oleh pamong praja

Pengambilan data melalui wawancara dengan pengurus PNPM Kecamatan Kalijambe, untuk mengetahui data awal yang akan digunakan untuk sebagai *commit to user*



acuan dalam pengambilan sampel. Gambar 4 menunjukkan wawancara dengan pengurus PNPM di Kecamatan Kalijambe.

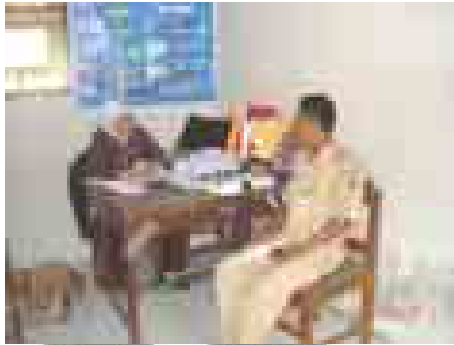


Gambar 4  
Wawancara dengan pengurus PNPM di Kecamatan

Pengumpulan data responden di desa – desa program PNPM, dilakukan untuk mengetahui karakteristik anggota UPPKS dengan wawancara dan tanggapan dari kuesioner penelitian ditunjukkan Gambar 5 dan Gambar 6.



Gambar 5  
Proses wawancara dengan anggota UPPKS



Gambar 6  
Proses pengisian kuesioner dengan anggota UPPKS

## B. Data Hasil Penelitian

### 1. Respon data persepsi perangkat desa terhadap pelaksanaan PNPM

Pengambilan respon data persepsi perangkat desa dengan teknik *cluster randome sampling* didapatkan 9 (sembilan) desa dari 14 (empat belas) desa yang ada di wilayah kecamatan Kalijambe. Tabel 2 dan Tabel 3 menunjukkan distribusi frekuensi asal desa pamong praja dan jabatannya.

Tabel 2  
Distribusi frekuensi asal desa Pamong praja

Desa	frekuensi	prosentase (%)
Donoyudan	1	6.7
JetisKarangpung	1	6.7
Kalimacan	1	6.7
Keden	2	13.3
Krikilan	2	13.3
Ngebung	2	13.3
Sambirembe	2	13.3
Saren	1	6.7
Trobayan	3	20.0

Sumber : Data primer diolah (2010)

Tabel 3  
Distribusi frekuensi jabatan Pamong praja

Desa	frekuensi	prosentase (%)
Bendahara	1	6.7
Jogo Boyo	2	13.3
Kades	4	26.7
Kadus	3	20.0
Kaur Ekban	3	20.0
Pamong Tani Desa	2	13.3
Total	15	100.0

Sumber : Data primer diolah (2010)

Tabel 4 menunjukkan respon pamong praja terhadap program PNPM yang dilaksanakan di wilayahnya masing – masing.

Tabel 4  
Respon pamong praja terhadap program PNPM

Kode	Pertanyaan	Jawaban				Jumlah	Rata-Rata	Standar Deviasi
		SS	S	TS	STS			
P1	Adanya program-program pemberdayaan masyarakat dan atau penanggulangan kemiskinan dari gagasan seperti PNPM-PKK dapat membantu pengembangan ekonomi pedesaan.	12	3	0	0	57	3,800	0,414
P2	Program-program daerah dalam memberdayakan masyarakat dan atau menanggulangi kemiskinan melalui PNPM-PKK sudah efektifitas	12	3	0	0	57	3,800	0,4140
P3	Pemberian pelatihan kepada anggota UPPKS dari PNPM-PKK dapat membantu pengembangan ekonomi pedesaan	10	5	0	0	55	3,6667	0,488
P4	Anggota UPPKS saat ini sudah dapat menggunakan manajemen usaha dalam melaksanakan usahanya	8	7	0	0	53	3,533	0,5164
P5	Kebutuhan dana PNPM-PKK sudah sesuai dengan usaha yang dilakukan para anggota UPPKS	8	7	0	0	53	3,533	0,5164

Sumber : Data primer diolah (2010)

Berdasarkan Tabel 4 dapat diketahui bahwa :

*commit to user*

1. Adanya program-program pemberdayaan masyarakat dan atau penanggulangan kemiskinan dari gagasan seperti PNPM-PKK dapat membantu pengembangan ekonomi pedesaan, hal ini dapat dilihat dari rata – rata persepsi pamong desa sebesar 3,800 yang menunjukkan bahwa tingkat persetujuan mereka sudah lebih dari setuju.
2. Program-program daerah dalam memberdayakan masyarakat dan atau menanggulangi kemiskinan melalui PNPM-PKK sudah efektifitas, hal ini dapat dilihat dari rata – rata persepsi pamong desa sebesar 3,800 yang menunjukkan bahwa tingkat persetujuan mereka sudah lebih dari setuju.
3. Pemberian pelatihan kepada anggota UPPKS dari PNPM-PKK dapat membantu pengembangan ekonomi pedesaan, hal ini dapat dilihat dari rata – rata persepsi pamong desa sebesar 3,667 yang menunjukkan bahwa tingkat persetujuan mereka sudah lebih dari setuju.
4. Anggota UPPKS saat ini sudah dapat menggunakan manajemen usaha dalam melaksanakan usahanya, hal ini dapat dilihat dari rata – rata persepsi pamong desa sebesar 3,533 yang menunjukkan bahwa tingkat persetujuan mereka sudah lebih dari setuju.
5. Kebutuhan dana PNPM-PKK sudah sesuai dengan usaha yang dilakukan para anggota UPPKS, hal ini dapat dilihat dari rata – rata

persepsi pamong desa sebesar 3,533 yang menunjukkan bahwa tingkat persetujuan mereka sudah lebih dari setuju.

## 2. Karakteristik anggota kelompok UPPKS

Karakteristik anggota UPPKS ditunjukkan oleh Tabel 5 sampai Tabel 8 meliputi, umur, jenis kelamin, jumlah tanggungan keluarga, dan tingkat pendidikan.

Tabel 5  
Karakteristik anggota UPPKS berdasarkan umur

Umur	frekuensi	Prosentase (%)
30 tahun ke bawah	6	15,8
31 - 40 Tahun	9	23,7
41 - 50 Tahun	15	39,5
51 Tahun ke atas	8	21,1
Total	38	100.0
Umur rata - rata	42,74 tahun	

Sumber : Data primer diolah (2010)

Berdasarkan Tabel 5 dapat diketahui bahwa rata – rata umur anggota UPPKS adalah 42,74 tahun, hal ini menunjukkan bahwa masyarakat yang memanfaatkan program PNPM sudah berumur matang dalam menjalankan sebuah usaha. Umur anggota UPPKS paling banyak antara 41 – 50 tahun sebesar 39,5 % (15 orang), kemudian umur 31 – 40 tahun sebesar 23,7% (9 orang), umur 51 tahun keatas sebesar 21,1 % (8 orang) dan yang paling sedikit adalah umur 30 tahun kebawah sebesar 15,8% (6 orang).

Berdasarkan Tabel 6 dapat diketahui bahwa jenis kelamin anggota UPPKS yang memanfaatkan program PNPM didominasi oleh wanita

sebesar 76,3% (29 orang ) dan jenis kelamin laki – laki hanya sebesar 23,7% (9 orang).

Tabel 6  
Karakteristik anggota UPPKS berdasarkan jenis kelamin

Jenis Kelamin	frekuensi	Prosentase (%)
Laki - Laki	9	23.7
Wanita	29	76.3
Total	38	100.0

Sumber : Data primer diolah (2010)

Berdasarkan Tabel 7 dapat diketahui bahwa jumlah tanggungan keluarga anggota UPPKS yang memanfaatkan program PNPM cukup kecil yang berarti mereka adalah keluarga kecil, hal ini ditunjukkan dari rata – rata jumlah tanggungan keluarga sebesar 2,079. Jumlah tanggungan keluarga didominasi oleh anggota UPPKS yang memiliki tanggungan 1 orang yaitu 39,5% (15 orang), kemudian jumlah tanggungan 2 orang sebesar 26,3% (10 orang), tanggungan 3 orang sebesar 21,1% (8 orang) dan yang paling sedikit adalah anggota UPPKS yang memiliki jumlah tanggungan 4 orang yaitu sebesar 13,2% (5 orang).

Tabel 7  
Karakteristik anggota UPPKS berdasarkan jumlah tanggungan keluarga

Jumlah tanggungan keluarga (orang)	frekuensi	Prosentase (%)
1	15	39.5
2	10	26.3
3	8	21.1
4	5	13.2
Total	38	100.0
Rata-rata	2,079	

Sumber : Data primer diolah (2010)

Berdasarkan Tabel 8 dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan anggota UPPKS yang memanfaatkan program PNPM masih cukup rendah, hal ini dapat dilihat bahwa anggota UPPKS didominasi oleh anggota yang memiliki tingkat pendidikan Sekolah dasar sebanyak 39,5% (15 orang) dan SMP sebanyak 36,8% (14 orang). Anggota UPPKS yang berpendidikan SMA hanya sebesar 18,4% (7 orang) dan yang pernah mengenal bangku kuliah hanya 5,3% (2 orang).

Tabel 8  
Karakteristik anggota UPPKS berdasarkan tingkat pendidikan

Tingkat pendidikan	frekuensi	Prosentase (%)
Sekolah Dasar	15	39.5
SMP	14	36.8
SMA	7	18.4
D1 - S1	2	5.3
Total	38	100.0

Sumber : Data primer diolah (2010)

### 3. Partisipasi masyarakat terhadap program PNPM

Partisipasi masyarakat terhadap adanya program PNPM yang dikelola oleh PKK Kecamatan ditunjukkan dari jenis – jenis usaha yang dilakukan anggota dan besarnya dana PNPM yang dimanfaatkan oleh anggota UPPKS.

Partisipasi masyarakat terhadap program PNPM yang digunakan untuk beberapa usaha antara lain: (1) jasa, dimana dana PNPM digunakan untuk modal membeli peralatan, (2) dagang, dimana dana PNPM digunakan untuk menambah modal usaha, dan (3) industri rumah tangga,

dimana dana PNPM digunakan untuk menambah modal dalam pembelian bahan baku.

Tabel 9 menunjukkan partisipasi masyarakat pada program PNPM berdasarkan jenis usaha yang dijalankan. Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui masyarakat pedagang merupakan masyarakat yang paling dominan dalam memanfaatkan program PNPM yaitu sebesar 47,1% (18 orang), dan masyarakat industri rumah tangga sebesar 42,1% (16 orang) dan yang paling kecil adalah masyarakat usaha jasa sebesar 10,5% (4 orang).

Tabel 9  
Partisipasi masyarakat pada program PNPM berdasarkan jenis usaha yang dijalankan

Jenis Usaha	frekuensi	Prosentase (%)
Pedagang	18	47.4
Industri Rumah Tangga	16	42.1
Jasa	4	10.5
Total	38	100.0

Sumber : Data primer diolah (2010)

Partisipasi masyarakat terhadap program PNPM berdasarkan dana yang diterima bervariasi dari Rp 2.000.000,00 sampai Rp 9.000.000,00. Tabel 10 menunjukkan besarnya dana PNPM yang digunakan anggota UPPKS sebagai modal usaha. Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa rata – rata dana PNPM yang dimanfaatkan untuk modal usaha sebesar Rp 4.370.000,00. Hal ini menunjukkan bahwa usaha – usaha yang dilakukan oleh anggota UPPKS cukup besar dilihat dari skala lingkungan pedesaan.



Berdasarkan Tabel 10 dapat diketahui bahwa dana yang diterima anggota UPPKS paling banyak Rp 3.000.000,00 sebanyak 36,8% (14 orang), kemudian Rp 6.000.000,00 sebanyak 23,7% (9 orang), dana PNPM yang diterima anggota UPPKS sebesar RP 2.000.000,00 ada 7,9% (3 orang) dan Rp 7.000.000,00 ada 5,3% (2 orang) dan sisanya Rp 5.000.000,00; Rp 8.000.000,00 dan Rp 9.000.000,00 masing – masing 2,6% (1 orang).

Tabel 10  
Partisipasi masyarakat pada program PNPM berdasarkan dana yang diterima

Dana yang diterima	frekuensi	Prosentase (%)
Rp 2.000.000,00	3	7,9
Rp 3.000.000,00	14	36,8
Rp 4.000.000,00	7	18,4
Rp 5.000.000,00	1	2,6
Rp 6.000.000,00	9	23,7
Rp 7.000.000,00	2	5,3
Rp 8.000.000,00	1	2,6
Rp 9.000.000,00	1	2,6
Total	Rp 166.000.000,00	
Rata - Rata	Rp 4.370.000,00	

Sumber : Data primer diolah (2010)

#### 4. Pemanfaatan dana PNPM oleh anggota kelompok UPPKS

Pemanfaatan dana PNPM oleh anggota dimanfaatkan untuk penambahan modal kerja, bergantung dari jenis usaha. Untuk usaha jasa (penjahit) digunakan untuk membeli perlengkapan menjahit, sehingga mereka dapat mengurangi biaya dalam proses menjahit. Untuk usaha industri rumah tangga digunakan untuk pembelian bahan baku yang lebih banyak, dan untuk pedagang digunakan untuk menambah modal

berdagang. Adanya pengurangan biaya proses, penambahan jumlah bahan baku, dan tambahan modal berdagang mengakibatkan adanya perubahan jumlah tenaga kerja dan penghasilan anggota UPPKS. Tabel 11 menunjukkan jenis usaha yang memanfaatkan dana program PNPM, sedangkan Tabel 12 menunjukkan jumlah tenaga kerja dan penghasilan anggota UPPKS sebelum dan setelah program PNPM.

Tabel 11  
Pemanfaatan dana dari program PNPM

Jenis Usaha	frekuensi	Prosentase (%)
Dagang	19	50,0
Industri Rumah Tangga	15	39,5
Jasa	4	10,5
Jumlah	38	100

Sumber : Data primer diolah (2010)

Berdasarkan Tabel 11 dapat diketahui bahwa masyarakat pedagang merupakan masyarakat yang palimh dominan dalam memanfaatkan dana PNPM yaitu sebesar 50,0% (19 orang), dan mayarakat industri rumah tangga sebesar 39,5% (15 orang) dan yang paling sedikit adalah masyarakat usaha jasa, hanya sebesar 10,5% (4 orang). Hal ini menunjukkan bahwa dana PNPM digunakan untuk ekonomi produktif.

Tabel 12  
Rata – rata perubahan kondisi usaha anggota UPPKS

Kondisi Usaha	Sebelum Program	Setelah Program	Perubahan
Jumlah Tenaga Kerja	52	67	+ 15
Jumlah Penghasilan	Rp 954.500,00	Rp 1.655.000,00	Rp 705.000,00

Sumber : Data primer diolah (2010)

Berdasarkan Tabel 12 dapat diketahui bahwa adanya dana dari program PNPM dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja, hal ini dapat dilihat bahwa jumlah tenaga kerja meningkat 15 orang tenaga kerja dari 52 menjadi 67 orang tenaga kerja. Tabel 12 juga menunjukkan adanya peningkatan penghasilan rata – rata tiap bulan sebesar Rp 705.000,00 dari Rp 954.500,00 menjadi Rp 1.655.000,00.

#### 5. Persepsi penerima program PNPM-PKK

Tabel 13 menunjukkan jawaban responden terhadap persepsi anggota UPPKS penerima dana program PNPM melalui PKK. Berdasarkan Tabel 13 dapat diketahui bahwa nilai rata – rata persepsi penerima program diatas 3 (tiga) yaitu 3,41. Hal ini menunjukkan bahwa persepsi anggota UPPKS terhadap program PNPM dilihat dari segi, sosialisasi, keterlibatan kelompok sasaran, status dana pinjaman, dan kegiatan yang dilakukan adalah sudah baik.

Tabel 13  
Jawaban persepsi penerima program PNPM-PKK

Kode	Pertanyaan	JAWABAN				Jumlah	Rata-Rata	Standar Deviasi
		SS	S	TS	STS			
X11	Sosialisasi program PNPM – PKK sudah efektifitas	24	14	0	0	138	3,6316	0,48885
X12	Keterlibatan kelompok sasaran sudah tinggi	10	28	0	0	124	3,2632	0,44626
Y3	Pemahaman terhadap materi sosialisasi sudah baik	5	33	0	0	119	3,1316	0,34257
X14	Anggota kelompok UPPKS mengetahui status dana pinjaman	13	25	0	0	127	3,3421	0,48078
X15	Kegiatan PNPM-PKK yang dilakukan sudah baik	26	12	0	0	140	3,6842	0,47107
Total		78	112	0	0	648	3,4105	0,4459

Sumber : Data primer diolah (2010)

Berdasarkan Tabel 13 dapat diketahui bahwa persepsi anggota UPPKS penerima dana PNPM paling tinggi adalah persepsi mereka terhadap sosialisasi program yang efektif yaitu sebesar 3,616. Nilai terendah adalah persepsi mereka terhadap pemahaman status dana pinjaman yaitu sebesar 3,131.

## 6. Intervensi perangkat desa

Tabel 14 menunjukkan jawaban responden terhadap intervensi perangkat desa. Berdasarkan Tabel 14 dapat diketahui bahwa nilai rata – rata intervensi perangkat desa dibawah 2 (dua) yaitu 1,421. Hal ini menunjukkan bahwa intervensi perangkat desa terhadap anggota UPPKS dilihat dari segi, tidak transparansinya penggunaan dana, campur tangan perangkat desa dalam penetapan kelompok dan ketentuan jenis usaha yang dilakukan adalah sangat minim sekali.

Tabel 13  
Jawaban responden tentang intervensi perangkat desa

Kode	Pertanyaan	JAWABAN				Jumlah	Rata-Rata	Standar Deviasi
		SS	S	TS	STS			
X21	Transparansi penggunaan dana belum transparan	0	0	8	30	46	1,2105	0,41315
X22	Saat ini adan campur tangan dalam penetapan kelompok sasaran oleh perangkat desa	0	0	23	15	61	1,6053	0,49536
X23	Saat ini Jenis kegiatan PNPM – PKK ditentukan oleh perangkat desa	0	0	17	21	55	1,4474	0,50390
Total		0	0	48	66	162	1,421	0,4708

Sumber : Data primer diolah (2010)

Berdasarkan Tabel 14 dapat diketahui bahwa ketidak transparansi tentang penggunaan dana oleh perangkat desa memiliki nilai yang paling

kecil yaitu 1,210. Nilai tertinggi adalah campur tangan perangkat desa terhadap penentuan kelompok sasaran yaitu sebesar 1,605.

## 7. Kinerja tenaga pendamping masyarakat

Tabel 15 menunjukkan jawaban responden terhadap kinerja tenaga pendamping PNPM. Berdasarkan Tabel 15 dapat diketahui bahwa nilai rata – rata kinerja tenaga pendamping PNPM diatas 3 (tiga) yaitu 3,305. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas yang baik, fungsi pelaksanaan dan lamanya pendampingan adalah sudah baik.

Tabel 15  
menunjukkan jawaban responden terhadap  
kinerja tenaga pendamping PNPM

Kode	Pertanyaan	JAWABAN				Jumlah	Rata-Rata	Standar Deviasi
		SS	S	TS	STS			
X31	Tenaga pendamping PNPM-PKK pada kelompok saya memiliki kualitas yang baik	15	23	0	0	129	3,3947	0,49536
X32	Fungsi pendampingan selama ini dapat membantu pelaksanaan PNPM-PKK	14	24	0	0	128	3,3684	0,48885
X33	Aktifitas pendampingan pada kelompok saya sudah lama terjadi	11	27	0	0	125	3,2895	0,45961
Total		40	74	0	0	382	3,3059	0,4813

Sumber : Data primer diolah (2010)

Berdasarkan Tabel 15 dapat diketahui bahwa kinerja tenaga pendamping yang paling besar adalah tenaga pendampingan dari PNPM memiliki kualitas yang baik memiliki nilai yang paling besar yaitu 3,394. Nilai terendah adalah lamanya aktifitas pendampingan yang dilakukan oleh tenaga PNMPM yaitu sebesar 3,289.

## 8. Pengembangan ekonomi pedesaan

Tabel 16 menunjukkan jawaban responden manfaat program PNPM sebagai sarana pengembangan ekonomi pedesaan. Berdasarkan Tabel 16 dapat diketahui bahwa nilai rata – rata manfaat program PNPM diatas 3 (tiga) yaitu 3,194. Hal ini menunjukkan bahwa program PNPM memiliki manfaat yang baik dalam pengembangan ekonomi pedesaan.

Tabel 16  
Jawaban responden terhadap manfaat program PNPM  
sebagai sarana pengembangan ekonomi pedesaan

Kode	Pertanyaan	JAWABAN				Jumlah	Rata-Rata	Standar Deviasi
		SS	S	ST	STS			
Y1	Pelatihan yang diberikan PPK Kecamatan memberikan Manfaat terhadap pengembangan ekonomi pedesaan	17	21	0	0	131	3,4474	0,5039
Y2	Pengusaan materi pelatihan dapat membantu pengembangan ekonomi pedesaan	8	30	0	0	122	3,2105	0,4131
Y3	Kemampuan menggunakan manajemen usaha dapat membantu pengembangan ekonomi pedesaan	5	33	0	0	119	3,1316	0,3425
Y4	Kebutuhan dana PNPM-PKK sudah sesuai dengan usaha yang dilakukan	14	24	0	0	128	3,3684	0,4888
Y5	Perubahan sikap akibat adanya PNPM-PKK dapat membantu pengembangan ekonomi pedesaan	5	33	0	0	119	3,1316	0,3425
Y6	Komunikasi dalam kelompok UPPKS yang dibentuk PNPM-PKK dapat berjalan dengan baik sehingga dapat membantu pengembangan ekonomi pedesaan	5	33	0	0	119	3,1316	0,3425
Y7	Intensitas pertemuan dalam kelompok dapat membantu pengembangan ekonomi pedesaan	5	33	0	0	119	3,1316	0,3425
Y8	Kesadaran akan kesehatan membantu pengembangan ekonomi pedesaan	7	31	0	0	121	3,1842	0,3928
Y9	Aspek peningkatan wawasan membantu pengembangan ekonomi pedesaan	4	34	0	0	118	3,1053	0,3110
Y10	Kemampuan menjalin hubungan membantu pengembangan ekonomi pedesaan	4	34	0	0	118	3,1053	0,3110
Total		74	306	0	0	1214	3,1948	0,3790

Sumber : Data primer diolah (2010)

*commit to user*

Berdasarkan Tabel 16 dapat diketahui bahwa pengembangan ekonomi pedesaan yang diakibatkan oleh adanya program PNPM yang paling baik adalah kebutuhan dana PNPM-PKK sudah sesuai dengan usaha yang dilakukan anggota UPPKS dengan nilai rata – rata 3,684. Nilai terendah adalah aspek peningkatan wawasan membantu pengembangan ekonomi pedesaan yaitu 3,105.

### C. Uji Instrumen

#### 1. Uji Validitas

Pengujian validitas kuisioner dalam penelitian bertujuan untuk mengetahui sejauh mana alat pengukuran yang digunakan mengukur apa yang ingin diukur. Pengujian validitas ini digunakan *Product Moment Correlation*, yaitu dengan mengkorelasikan skor antara item dengan skor total menggunakan bantuan program SPSS. Menurut Ghazali (2009) suatu item dinyatakan valid jika indek korelasi *product moment pearson* ( $r$ )  $\geq$  0,3. Hasil dari pengolahan data ditunjukkan pada Tabel 17 sampai Tabel 20.

Tabel 17  
Hasil uji validitas item pertanyaan  
penerima program PNPM-PKK (X1)

Kode	r hitung	r tabel	kondisi	kesimpulan
X11	0,559	0,3	$r_{hitung} > r_{tabel}$	valid
X12	0,332	0,3	$r_{hitung} > r_{tabel}$	valid
X13	0,441	0,3	$r_{hitung} > r_{tabel}$	valid
X14	0,502	0,3	$r_{hitung} > r_{tabel}$	valid
X15	0,436	0,3	$r_{hitung} > r_{tabel}$	valid

Sumber : Data primer diolah (2010)

*commit to user*

Tabel 17 menunjukkan nilai koefisien validitas ( $r_{xy}$  hitung) untuk, 5 (lima) item pertanyaan penerima program PNPM-PKK (X1). Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa semua item pertanyaan adalah valid sebagai alat ukur, karena memiliki nilai  $r_{xy} \geq 0,3$ .

Tabel 18 menunjukkan nilai koefisien validitas ( $r_{xy}$  hitung) untuk 3 (tiga) item pertanyaan intervensi perangkat desa (X2). Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa semua item pertanyaan adalah valid sebagai alat ukur, karena memiliki nilai  $r_{xy} \geq 0,3$ .

Tabel 18  
Hasil uji validitas item pertanyaan  
intervensi perangkat desa (X2)

Kode	r hitung	r tabel	kondisi	kesimpulan
X21	0,406	0,3	$r_{hitung} > r_{tabel}$	valid
X22	0,550	0,3	$r_{hitung} > r_{tabel}$	valid
X23	0,671	0,3	$r_{hitung} > r_{tabel}$	valid

Sumber : Data primer diolah (2010)

Tabel 19 menunjukkan nilai koefisien validitas ( $r_{xy}$  hitung) untuk 3 (tiga) item pertanyaan kinerja tenaga pedamping masyarakat (X3). Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa semua item pertanyaan adalah valid sebagai alat ukur, karena memiliki nilai  $r_{xy} \geq 0,3$ .

Tabel 19  
Hasil uji validitas item pertanyaan  
kinerja tenaga pedamping masyarakat (X3)

Kode	r hitung	r tabel	kondisi	kesimpulan
X31	0,728	0,3	$r_{hitung} > r_{tabel}$	valid
X32	0,850	0,3	$r_{hitung} > r_{tabel}$	valid
X33	0,812	0,3	$r_{hitung} > r_{tabel}$	valid

Sumber : Data primer diolah (2010)



Tabel 20 menunjukkan nilai koefisien validitas ( $r_{xy}$  hitung) untuk 10 (sepuluh) item pertanyaan pengembangan ekonomi pedesaan(Y). Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa semua item pertanyaan adalah valid sebagai alat ukur, karena memiliki nilai  $r_{xy} \geq 0,3$ .

Tabel 20  
Hasil uji validitas item pertanyaan  
pengembangan ekonomi pedesaan (Y)

Kode	r hitung	r tabel	kondisi	kesimpulan
Y1	0,444	0,3	$r_{hitung} > r_{tabel}$	valid
Y2	0,591	0,3	$r_{hitung} > r_{tabel}$	valid
Y3	0,580	0,3	$r_{hitung} > r_{tabel}$	valid
Y4	0,221	0,3	$r_{hitung} > r_{tabel}$	valid
Y5	0,501	0,3	$r_{hitung} > r_{tabel}$	valid
Y6	0,620	0,3	$r_{hitung} > r_{tabel}$	valid
Y7	0,424	0,3	$r_{hitung} > r_{tabel}$	valid
Y8	0,752	0,3	$r_{hitung} > r_{tabel}$	valid
Y9	0,538	0,3	$r_{hitung} > r_{tabel}$	valid
Y10	0,581	0,3	$r_{hitung} > r_{tabel}$	valid

Sumber : Data primer diolah (2010)

## 2. Uji Reliabilitas

Pengujian reliabilitas dilakukan untuk mengetahui sejauh mana hasil suatu pengukuran relatif konsisten apabila pengukuran diulangi dua kali atau lebih, Suatu alat ukur dikatakan reliable jika alat itu dalam mengukur suatu gejala yang berlainan senantiasa mengukur suatu gejala yang berlainan senantiasa mengukur sejauh mana alat ukur dapat dipercaya dan dapat diandalkan, Reliabilitas konstruk dinilai dengan menghitung *Cronbach's Alpha* instrumen yang digunakan, Nilai batas yang digunakan untuk menilai sebuah tingkat reliabilitas yang dapat

diterima adalah 0,60 (Maholtra, dalam Ghozali , 2008), Sekaran (2002) membagi tingkat reliabilitas dengan kriteria sebagai berikut :

- (1) Nilai *Cronbach's Alpha* 0,80 – 1,00 : Reliabilitas baik
- (2) Nilai *Cronbach's Alpha* 0,60 – 0,79 : Reliabilitas diterima
- (3) Nilai *Cronbach's Alpha* kurang dari 0,60 : Reliabilitas kurang baik

Tabel 21  
Hasil uji reliabilitas variabel

Variabel/Dimensi		<i>Cronbach's Alpha</i>	Keterangan
Y	Pengembangan ekonomi pedesaan	0,821	Reliabilitas baik
X1	Persepsi penerima program PNPM-PKK	0,694	Reliabilitas diterima
X2	Intervensi perangkat desa	0,715	Reliabilitas diterima
X3	Kinerja tenaga pedamping masyarakat	0,896	Reliabilitas baik

Sumber : Data primer diolah (2010)

Tabel 21 menunjukkan hasil perhitungan *Alpha Cronbach* variabel – variabel penelitian. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa semua item pertanyaan adalah reliabel (handal) sebagai alat ukur, karena memiliki nilai *Alpha Cronbach*  $\geq 0,6$ .

#### D. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dimaksudkan untuk dapat memenuhi beberapa unsur akurasi daya penduga parameter yang tidak bias, untuk melihat tingkat ketelitian yang akan mencerminkan tingkat efisien hasil analisis dan keajegan (konsisten) hasil yang diperoleh sehingga persamaan regresi yang dihasilkan benar-benar dapat dipercaya untuk memprediksi.

## 1. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan dengan menggunakan uji *kolmogorov-smirnov* dengan cara membandingkan nilai probabilitas (*p-value*) yang diperoleh dengan taraf signifikansi yang sudah ditentukan yaitu 0,05. Tabel 22 menunjukkan hasil uji *kolmogorov-smirnov*. Dasar pengambilan keputusan dalam uji normalitas adalah (Ghozali, 2009):

- a) Jika nilai probabilitas (*p-value*) masing-masing variabel independen dari lebih besar 0,05 maka data berdistribusi normal.
- b) Jika nilai probabilitas (*p-value*) masing-masing variabel independen lebih kecil dari 0,05 maka data tidak berdistribusi normal.

Tabel 22  
Hasil uji normal dengan uji kolmogorov-smirnov

**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Standardized Residual
N		38
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.95860259
Most Extreme Differences	Absolute	.187
	Positive	.187
	Negative	-.128
Kolmogorov-Smirnov Z		1.152
Asymp. Sig. (2-tailed)		.141

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Berdasarkan Tabel 22 dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini memiliki distribusi normal. Hal ini terlihat pada nilai  $Z_{\text{kolmogorov-smirnov}}$  (1.152) residual variabel independen X1, X2, dan X3, dengan variabel dependen Y memiliki nilai dibawah  $Z_{\text{tabel}}$  (1,96) atau nilai signifikansinya (0,141) lebih besar dari 0,05 (Ghozali, 2009).

## 2. Autokorelasi

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah regresi hasil pengolahan ada korelasi antara residual pada satu pengamatan dengan pengamatan yang lain dalam satu variabel. Konsekuensi dari autokorelasi adalah biasanya varian dengan nilai yang lebih kecil dari nilai yang sebenarnya, sehingga nilai  $R^2$  dan F cenderung overestimated. Cara untuk mendeteksi autokorelasi adalah dengan menggunakan pengujian *Durbin Watson* (DW) dengan ketentuan : nilai DW antara 1,65 sampai 2,35 dapat disimpulkan tidak ada Autokorelasi (Ghozali, 2009).

Berdasarkan hasil perhitungan dengan bantuan program SPSS. Didapatkan nilai DW dari data – data diatas dapat dilihat bahwa semua nilai *Durbin Watson* (DW) sebesar 1,939 (lampiran 8) yang berarti masih diantara 1,65 sampai 2,35, sehingga dapat disimpulkan bahwa semua data yang digunakan bebas dari autokorelasi.

## 3. Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas dalam penelitian ini diuji dengan metode regresi antara nilai residu ( *disturbance error* ) dari hasil regresi dengan masing-masing variabel independenya. Kreteria ada gejala heteroskedastisitas adalah nilai t hitung lebih besar dari 1,96 atau signifikansinya lebih kecil dari 0,05. Sebaliknya, jika nilai t hitung lebih kecil dari 1,96 dan signifikansinya lebih besar dari 0,05 berarti model

regresi menunjukkan bebas dari permasalahan heteroskedastisitas (Ghozali, 2009).

Dari Tabel 23 dapat dilihat bahwa nilai t hitung untuk semua variabel dependen X1, X2 dan X3 dengan variabel independen residual Y semuanya di bawah 1,96 dan signifikansinya di atas 0,05. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel – variabel independen dalam penelitian ini bebas heteroskedastisitas.

Tabel 23  
Hasil uji heteroskedastisitas

variabel independend	t hitung	sig.	Kesimpulan
X1	0,000	1,000	Tdk ada Heteroskedastisitas
X2	0,000	1,000	Tdk ada Heteroskedastisitas
X3	0,000	1,000	Tdk ada Heteroskedastisitas
Variabel dependen adalah residual Y			

Sumber : Data primer diolah (2010)

#### 4. Multikolinear

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Jika terjadi korelasi, maka terdapat masalah multikolinieritas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antara variabel independennya. Multikolinieritas yang berbahaya terjadi apabila nilai dari *variance inflation factor* (VIF) lebih besar dari 10 atau nilai *tolerance* lebih kecil dari 0,10 (Ghozali, 2009).

Tabel 24  
Nilai VIF dan *tolerance* dari uji multikolinieritas

Variabel independen	<i>Tolerance</i>	VIF
Persepsi penerima program PNPM-PKK (X1)	0,844	1,185
Intervensi perangkat desa (X2)	0,976	1,025
Kinerja tenaga pendamping masyarakat (X3)	0,828	1,207
Variabel dependen adalah Y		

Sumber : Data primer diolah (2010)

Dari hasil pengolahan data, masing masing variabel dapat dilihat pada Tabel 24. Dari Tabel 24 dapat dilihat bahwa semua nilai VIF jauh dibawah 10, dan nilai *tolerance* diatas 0,10 sehingga dapat disimpulkan bahwa semua data yang digunakan tidak terdapat multikolinieritas.

### E. Uji Hipotesis

Pengaruh – pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dalam penelitian digunakan analisis regresi linear berganda, uji t, uji F dan koefisien determinasi.

Regresi linear berganda digunakan untuk menguji pengaruh variabel – variabel independen Persepsi penerima program PNPM-PKK (X1), Intervensi perangkat desa (X2), dan Kinerja tenaga pendamping masyarakat (X3) terhadap Pengembangan ekonomi pedesaan (Y). Tabel 25 menunjukkan hasil analisis regresi linear berganda variabel independen terhadap variabel dependen. Berdasarkan Tabel 25 persamaan regresi linear yang dihasilkan adalah sebagai berikut :

$$Y = 0,141 + 0,649X1 - 0,415X2 + 0,507X3$$

Tabel 25  
Hasil analisis regresi linear berganda

variabel independen	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	0,141	0,049		6,413	0,0000
Persepsi penerima program PNPM-PKK (X1)	0,649	0,146	0,821	5,445	0,0046*
Intervensi perangkat desa (X2)	-0,415	0,108	-0,318	-3,686	0,0049*
Kinerja tenaga pedamping masyarakat (X3)	0,507	0,101	0,327	4,501	0,0061*
F hitung	29,347		R Square		0,252
Sigifikansi	0,008		Adjusted R Square		0,261
R	0,589		Dependent Variable: Pengembangan ekonomi pedesaan (Y)		

Sumber : Data primer diolah (2010) \*) Signifikan pada  $\alpha = 5\%$

Berdasarkan hasil perhitungan diatas, dapat disimpulkan bahwa:

- 1) Persepsi penerima program PNPM-PKK (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengembangan ekonomi pedesaan (Y) di Kabupaten Sragen. Hal ini karena nilai  $t_{hitung} (5,445) > t_{tabel} (\pm 1,96)$  dan tingkat signifikansi  $0,0046 \leq 0,05$ .
- 2) Intervensi perangkat desa (X2) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Pengembangan ekonomi pedesaan (Y) di Kabupaten Sragen. Hal ini karena nilai  $t_{hitung} (-3,686) > t_{tabel} (\pm 1,96)$  dan tingkat signifikansi  $0,0049 \leq 0,05$ .
- 3) Kinerja tenaga pedamping masyarakat (X3) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengembangan ekonomi pedesaan (Y) di Kabupaten Sragen. Hal ini karena nilai  $t_{hitung} (4,501) > t_{tabel} (\pm 1,96)$  dan tingkat

signifikansi  $0,0061 \leq 0,05$ .

- 4) Persepsi penerima program PNPM-PKK (X1), Intervensi perangkat desa (X2) dan Kinerja tenaga pendamping masyarakat (X3) berpengaruh secara simultan terhadap Pengembangan ekonomi pedesaan (Y) di Kabupaten Sragen. Hal ini karena nilai  $F_{hitung} (29,347) > F_{tabel} (\pm 4,96)$  dan tingkat signifikansi  $0,008 \leq 0,05$ .
- 5) Variabel Persepsi penerima program PNPM-PKK (X1) lebih dominan dalam mempengaruhi Pengembangan ekonomi pedesaan (Y) dibandingkan variabel lain, karena memiliki koefisien (0,649) yang lebih besar dibandingkan koefisien Intervensi perangkat desa (X2, - 0,415) dan Kinerja tenaga pendamping masyarakat (X3, 0,507).
- 6) Nilai *Adjusted. R<sup>2</sup>* (0,261) menunjukkan bahwa Persepsi penerima program PNPM-PKK (X1), Intervensi perangkat desa (X2) dan dan Kinerja tenaga pendamping masyarakat (X3) dapat menjelaskan Pengembangan ekonomi pedesaan (Y) Kabupaten Sragen sebesar 26,1%, sedangkan sisanya sebesar 83,9% dijelaskan oleh variabel lain.

## F. Pembahasan

Berdasarkan hasil-hasil analisis uji hipotesis, hasil penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 26.

### 1. Hasil Temuan Pertama

Hasil temuan pertama dalam penelitian ini menunjukkan ada pengaruh yang positif dan signifikan antara persepsi penerima program



terhadap pengembangan ekonomi pedesaan pada program PNPM-PKK di Kabupaten Sragen. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi persepsi penerima program PNPM semakin tinggi pula manfaat pengembangan ekonomi pedesaan pada program PNPM-PKK, sebaliknya semakin rendah persepsi penerima program PNPM semakin rendah pula manfaat pengembangan ekonomi pedesaan pada program PNPM-PKK.

Tabel 26  
Rangkuman hasil analisis uji hipotesis

No	Kode	Hipotesis	Status
1	Hipotesis 1a	Ada pengaruh yang signifikan antara persepsi penerima program terhadap pengembangan ekonomi pedesaan pada program PNPM-PKK di Kabupaten Sragen.	Terbukti
2	Hipotesis 1b	Ada pengaruh yang signifikan antara intervensi perangkat desa terhadap pengembangan ekonomi pedesaan pada program PNPM-PKK di Kabupaten Sragen.	Terbukti
3	Hipotesis 1c	Ada pengaruh yang signifikan kinerja tenaga pendamping masyarakat terhadap pengembangan ekonomi pedesaan pada program PNPM-PKK di Kabupaten Sragen.	Terbukti
2	Hipotesis 2	Ada pengaruh yang signifikan antara persepsi penerima program, intervensi perangkat desa, dan kinerja tenaga pendamping masyarakat secara simultan terhadap pengembangan ekonomi pedesaan pada program PNPM-PKK di Kabupaten Sragen.	Terbukti

## 2. Hasil Temuan Kedua

Hasil temuan kedua dalam penelitian ini menunjukkan ada pengaruh yang negatif dan signifikan antara intervensi perangkat desa terhadap pengembangan ekonomi pedesaan pada program PNPM-PKK di Kabupaten Sragen. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin kecil intervensi perangkat desa maka hasil pengembangan ekonomi pedesaan pada program PNPM-PKK akan semakin baik, sebaliknya semakin tinggi

tingkat intervensi perangkat desa akan semakin rendah pengembangan ekonomi pedesaan pada program PNPM-PKK yang dicapai.

### **3. Hasil Temuan Ketiga**

Hasil temuan ketiga dalam penelitian ini menunjukkan ada pengaruh yang positif dan signifikan antara kinerja tenaga pendamping masyarakat terhadap pengembangan ekonomi pedesaan pada program PNPM-PKK di Kabupaten Sragen. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi baik kinerja tenaga pendamping masyarakat akan meningkatkan pengembangan ekonomi pedesaan pada program PNPM-PKK, sebaliknya semakin rendah kinerja tenaga pendamping masyarakat semakin rendah pula pengembangan ekonomi pedesaan pada program PNPM-PKK yang dapat dilakukan.

### **4. Hasil Temuan Keempat**

Hasil temuan keempat dalam penelitian ini menunjukkan ada pengaruh simultan yang signifikan antara persepsi penerima program, intervensi perangkat desa dan kinerja tenaga pendamping masyarakat terhadap pengembangan ekonomi pedesaan pada program PNPM-PKK di Kabupaten Sragen. Hasil ini menunjukkan bahwa ketiga variabel tersebut merupakan faktor – faktor yang dapat mempengaruhi pengembangan ekonomi pedesaan di Kabupaten Sragen. Dari ketiga variabel tersebut didapatkan bahwa persepsi penerima program merupakan variabel yang paling dominan dalam mempengaruhi pengembangan ekonomi pedesaan di Kabupaten Sragen.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data deskriptif dan kuantitatif dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa :

1. Respon dan persepsi perangkat desa terhadap pelaksanaan PNPM adalah sebagai berikut :
  - a. Adanya program-program pemberdayaan masyarakat dan atau penanggulangan kemiskinan dari gagasan seperti PNPM-PKK dapat membantu pengembangan ekonomi pedesaan.
  - b. Program-program daerah dalam memberdayakan masyarakat dan atau menanggulangi kemiskinan melalui PNPM-PKK sudah efektifitas.
  - c. Pemberian pelatihan kepada anggota UPPKS dari PNPM-PKK dapat membantu pengembangan ekonomi pedesaan.
  - d. Anggota UPPKS saat ini sudah dapat menggunakan manajemen usaha dalam melaksanakan usahanya.
  - e. Kebutuhan dana PNPM-PKK sudah sesuai dengan usaha yang dilakukan para anggota UPPKS.
2. Karakteristik anggota kelompok UPPKS pemanfaatan dana PNPM pada program PPK di Kabupaten Sragen antara lain :
  - a. Rata – rata umur anggota UPPKS adalah 42,74 tahun, hal ini menunjukkan bahwa masyarakat yang memanfaatkan program PNPM sudah berumur matang dalam menjalankan sebuah usaha.

*commit to user*

- b. Jenis kelamin anggota UPPKS yang memanfaatkan program PNPM didominasi oleh wanita sebesar 76,3% (29 orang).
  - c. Jumlah tanggungan keluarga anggota UPPKS yang memanfaatkan program PNPM cukup kecil yang berarti mereka adalah keluarga kecil,
  - d. Tingkat pendidikan anggota UPPKS yang memanfaatkan program PNPM masih cukup rendah, hal ini dapat dilihat bahwa anggota UPPKS didominasi oleh anggota yang memiliki tingkat pendidikan Sekolah Dasar sebanyak 39,5% (15 orang) dan SMP sebanyak 36,8% (14 orang).
3. Partisipasi masyarakat terhadap adanya program PNPM yang dikelola oleh PKK Kecamatan ditunjukkan dari jenis – jenis usaha yang dilakukan anggota dan besarnya dana PNPM yang dimanfaatkan oleh anggota UPPKS. Partisipasi masyarakat terhadap program PNPM yang digunakan untuk beberapa usaha antara lain: (1) jasa, dimana dana PNPM digunakan untuk modal membeli peralatan, (2) dagang, dimana dana PNPM digunakan untuk menambah modal usaha, dan (3) industri rumah tangga, dimana dana PNPM digunakan untuk menambah modal dalam pembelian bahan baku.
  4. Pemanfaatan dana PNPM oleh anggota dimanfaatkan untuk penambahan modal kerja, bergantung dari jenis usaha. Untuk usaha jasa (penjahit) digunakan untuk membeli perlengkapan menjahit, sehingga mereka dapat mengurangi biaya dalam proses menjahit. Untuk usaha industri rumah

tangga digunakan untuk pembelian bahan baku yang lebih banyak, dan untuk pedagang digunakan untuk menambah modal berdagang.

5. Pengaruh persepsi penerima program PNPM-PKK, intervensi perangkat desa dan kinerja tenaga pedamping masyarakat terhadap pengembangan ekonomi pedesaan pada PNPM-PKK pengentasan kemiskinan di Kabupaten Sragen adalah sebagai berikut :

- a. Persepsi penerima program PNPM-PKK (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengembangan ekonomi pedesaan.
- b. Intervensi perangkat desa berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Pengembangan ekonomi pedesaan.
- c. Kinerja tenaga pedamping masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengembangan ekonomi pedesaan.
- d. Persepsi penerima program PNPM-PKK, Intervensi perangkat desa dan Kinerja tenaga pedamping masyarakat berpengaruh secara simultan terhadap Pengembangan ekonomi pedesaan di Kabupaten Sragen.
- e. Persepsi penerima program PNPM-PKK merupakan variabel yang dominan dalam mempengaruhi pengembangan ekonomi pedesaan.
- f. Persepsi penerima program PNPM-PKK, intervensi perangkat desa dan dan kinerja tenaga pedamping masyarakat dapat menjelaskan pengembangan ekonomi pedesaan di Kabupaten Sragen sebesar 26,1%, sedangkan sisanya sebesar 83,9% dijelaskan oleh variabel lain.

## B. SARAN

### a. Saran Manajerial

Dampak yang positif adanya PNPM di Kabupaten Sragen, menunjukkan program ini cukup berhasil dalam hal :

- 1) Meningkatkan pendapatan anggota kelompok UPPKS dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia.
- 2) Meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap upaya peningkatan kesejahteraan keluarga miskin di lingkungannya dengan adanya peningkatan jumlah tenaga kerja yang semakin banyak.
- 3) Meningkatnya kemandirian kelompok yang ditandai dengan makin berkembangnya usaha produktif anggota dan kelompok, makin kuatnya permodalan kelompok, makin rapinya administrasi kelompok, serta makin luasnya interaksi kelompok dengan kelompok lain dalam masyarakat.

Untuk itu hendaknya pengelola program PNPM dapat melakukan hal – hal sebagai berikut :

- 1) Memberikan pinjaman lagi kepada anggota kelompok UPPKS yang dianggap dapat menjalankan modal yang dipinjam.
- 2) Menambah jumlah modal pinjaman untuk tahun – tahun kedepan.
- 3) Memberikan persyaratan yang mudah kepada anggota kelompok UPPKS yang baru.

- 4) Mengontrol kinerja anggota kelompok UPPKS, agar dapat lebih meningkatkan produktivitas dan penambahan jumlah tenaga kerja baru.

Untuk anggota kelompok UPPKS penerima dana PNPM dapat melakukan hal – hal sebagai berikut :

- 1) Mau membuka wawasan untuk bekerja sama dengan dunia usaha yang saling mendukung usahanya.
- 2) Memperbaiki kinerja dan mengembangkan usahanya karena kegiatannya yang mereka lakukan selama ini bersifat tradisional mengikuti jejak pendahulunya.
- 3) Berusaha memotivasi diri bahwa dengan bekerja keras dirinya mampu mengentaskan kemiskinan untuk hidup mandiri.

## **2. Saran Penelitian Kedepan**

Untuk peneliti kedepan beberapa saran yang dapat dilakukan untuk mengembangkan penelitian ini karena temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa mayoritas penerima dana PNPM adalah perempuan. Penelitian kedepan hendaknya perlu memfokuskan pada peran perempuan dalam memanfaatkan dana PNPM.